Masyarakat A S E A T T

Edisi 15 // April 2017







SSN: 9 772460 168002



PERSPEKTIF

4 Setahun Masyarakat ASEAN

LAPORAN UTAMA

8 Setahun Masyarakat ASEAN: Dorong Usaha Lokal Go ASEAN

LAPORAN KHUSUS

- 18 Membangun Indonesia dan ASEAN yang Ramah Anak
- 26 Kerja Sama ASEAN-Selandia Baru untuk Sejahterakan Masyarakat Indonesia
- 30 Pemuda Mencegah Violent Extremism

WAWANCARA

- 12 Alfamart Menembus Pasar ASEAN
- Jangan Ada Kata Bersayap untuk Perlindungan Anak

POJOK PSA

6 Terorisme: Salah Satu Tantangan Keamanan Non-Tradisional ASEAN

REPORTASE

Mahasiswa Pahami Hukum ASEAN

Bagi anda yang ingin mengirimkan tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silakan kirim melalui email: mma@kemlu.go.id

POJOK SOSIALISASI

- 44 Membangun Daya Saing Indonesia di ASEAN Lewat Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa
- 46 Mahasiswa Aceh Tidak Takut Hadapi Masyarakat ASEAN
- 48 Semangat Pelajar Jakarta Dukung ASEAN
- 50 Mahasiswa Dukung "ASEAN untuk Rakyat"

INFOGRAFIS

54 Survei Pembaca Majalah Masyarakat ASEAN





Pengarah

Direktur Jenderal Keria Sama ASEAN

Penanggung Jawab

Sekretaris Ditjen Kerja Sama ASEA

Redaktur

Heru Prayitno Bambang Witjaks Hikmat Moeljawa Mahmudin

Annie Yuliyar

Staf Redaksi

Ivorry Chaka Nathara Pranashant Mia Padmasari Niwa Rahmad Dwitama Rendy Hadiputra Hadi

Shirley Besauli Agu Argo Budi Prakoso

Bayu P. Oktavriyanto

Endang Susilowati

Michael F. Bastian Supit

Lindi Maha

Desain Grafis/Fotografer

Firmansyah Kustiawa

Pemelihara Situs Web

Melisa Heling Tomy Satria

Distribusi

Kasirun Tuwuh Ismai Mulyanto

Sekretariat

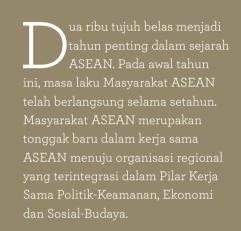
Basyiruddin Ahmad Hidayat Didi Suparyadi Rusmanto I'b. M. Ramadhan

Alamat Redaksi

irektorat Jenderal Kerja Sama ASEAN ementerian Luar Negeri . Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusa elp. 021-3509050/3509059 ux. 021-3509050

Ashariyadi

Sekretaris Ditjen Kerja Sama ASEAN



ke-50. Telah banyak capaian ASEAN ASEAN dalam arsitektur keamanan terhadap perdamaian di kawasan.

yang telah berusia satu tahun berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, sejahtera, demokratis, saling peduli

diberikan oleh Indonesia sebagai salah satu Founding Fathers ASEAN. Bagi Indonesia,

merupakan satu kesatuan yang harus terus diwujudkan secara konsisten

serta masyarakat dan berorientasi gagasan yang didorong oleh Indonesia sejak pengesahan *Bali* Concord II pada tahun 2003 dan memanfaatkan peluang di era Masyarakat ASEAN saat ini.

Sebagai *cornerstone* politik luar wadah bagi Indonesia untuk terus dan inisiatif dalam berbagai isu yang mencakup dalam tiga Pilar Kerja

Indonesia adalah negara extremism dan radikalisme melalui implementasi ASEAN Convention

Pada pilar Ekonomi, Indonesia terlibat aktif dalam upaya pelatihan di bidang peningkatan sumber daya manusia.

Sementara itu, dalam pilar Sosial dan Budava. Indonesia berhasil Informal Employment to Formal menghapuskan diskriminasi di jaminan perlindungan, terutama bagi

Menjelang usia lima dasawarsa, dan tuntutan untuk mewujudkan secara nyata ASEAN yang berpusat anggotanya dapat terangkat sehingga ASEAN makin dicintai rakyat karena



Salah satu sektor yang diharapkan mampu menyentuh hingga ke akar rumput adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi kawasan. Selain memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja. UMKM juga telah terbukti membantu perekonomian Indonesia ketika terjadi krisis ekonomi di tahun 1998.

Namun berdasarkan studi Asian Development Bank Institute pada tahun 2015, kontribusi UMKM Indonesia terhadap ekspor nasional baru mencapai 15, 8%. Angka ini masih terbilang rendah bila dibandingkan kontribusi UMKM negara ASEAN lainnya untuk ekspor nasionalnya masing-masing, seperti

Thailand yang mencapai 29, 5% ataupun Filipina dan Malaysia yang telah mencapai sekitar 20%.

Di balik tantangan tersebut, saat ini telah terdapat sedikitnya 720 perusahaan Indonesia yang berhasil menembus pasar ASEAN. Salah satu perusahaan tersebut adalah Alfamart yang telah beroperasi di Filipina sejak tahun 2014. Perusahaan ini bahkan masih akan terus berekspansi membuka hingga 350 gerai di Filipina pada 2017.

Keberhasilan Alfamart menembus pasar Filipina kiranya patut ditularkan kepada para pelaku usaha nasional lainnya. Salah satu kiat yang diterapkan Alfamart adalah perhatian khusus yang diberikan terhadap kultur dan perilaku budaya setempat untuk memastikan bahwa produk maupun layanan dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Alfamart juga menghadirkan sejumlah tim inti dari Indonesia yang sebagian besar merupakan manajer senior guna membantu pengoperasian dan pengembangan bisnis Alfamart di Filipina.

Kenyataan tersebut dapat menepis kekhawatiran sejumlah pihak bahwa pemberlakuan MEA membuat tenaga kerja Indonesia kalah bersaing dan Indonesia dibanjiri tenaga kerja dari negara ASEAN lainnya. Faktanya, pengaturan arus tenaga kerja di ASEAN diatur melalui sertifikasi MRA (Mutual

Recognition Arrangement) yang melakukan penyetaraan sertifikasi untuk sejumlah bidang profesi yang sejauh ini mencakup insinyur, perawat, arsitek, tenaga survei, tenaga pariwisata, akuntan, praktisi medis dan dokter gigi. Dengan demikian, hukum ketenagakerjaan masingmasing negara ASEAN tetap berlaku tetapi terdapat sertifikasi kompetensi profesi yang diakui secara bersama.

Untuk menjadikan ASEAN dicintai bagi rakyatnya, upaya memperkuat ASEAN yang berpusat pada rakyat (people-centered) dan berorientasi pada rakyat (people-oriented) menjadi visi utama ASEAN ke depan dengan menjadikan ASEAN yang tangguh, inklusif dan berorientasi rakyat. Hal ini direfleksikan dalam dokumen

"ASEAN 2025: Melangkah Maju
Bersama" yang berisikan langkahlangkah strategis implementasi
Masyarakat ASEAN hingga 2025.
Melalui Visi ASEAN 2025, ASEAN
diharapkan benar-benar menjadi
organisasi yang memberikan manfaat
langsung bagi rakyat dan melibatkan
peran serta rakyat secara aktif.
ASEAN juga semakin mengarah
menjadi kekuatan pendorong untuk
memimpin ekonomi.

Kemampuan ASEAN mengelola tantangan dan meraih peluang tidak dapat dilepaskan dari peran aktif Indonesia untuk menjadi motor penggerak proses transformasi serta mendorong pemanfaatan organisasi ini secara optimal untuk kepentingan nasional Indonesia. Sesuai amanat

Konstitusi, Indonesia menjadikan ASEAN lingkar konsentris untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia berpotensi memanfaatkan peluang berlakunya Masyarakat ASEAN. Bonus demograsi dan kekayaan Sumber Daya Alam juga merupakan faktor pendorong untuk memanfaatkan peluang besar pasar ASEAN dan berperan besar bagi terciptanya ASEAN sebagai basis produksi dan jaringan distribusi (supply chain) di kawasan.





MASING-MASING NEGARA ASEAN
MEMILIKI PROGRAM NASIONAL DALAM
RANGKA PENGEMBANGAN UMKM, DAN
HAL INI MENJADI SALAH SATU ACUAN
DALAM KERJA SAMA ASEAN UNTUK
MENDUKUNG PROGRAM PENINGKATAN
DAYA SAING UMKM.

ektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
memiliki peran yang tidak
bisa dipandang sebelah mata
bagi pertumbuhan dan kestabilan
ekonomi, baik di ASEAN maupun
Indonesia. Dari seluruh usaha
yang terdaftar di ASEAN sekitar
96% merupakan UMKM dan
mempekerjakan antara 75-90% dari
tenaga kerja di masing-masing
negara anggota ASEAN. UMKM
ASEAN juga memberikan kontribusi
sekitar 30-60% pada PDB di kawasan.

Bagi Indonesia, UMKM merupakan penyerap mayoritas tenaga kerja di Indonesia, hingga 97% dari seluruh tenaga kerja nasional. Selain memiliki kemampuan untuk menyerap pengangguran, UMKM juga telah terbukti membantu perekonomian Indonesia ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998.

Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor usaha mikro, kecil dan menengah terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%. Dengan proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit, peluang UMKM sebagai kekuatan ekonomi Indonesia perlu terus ditingkatkan.

Sayangnya, masih sedikit UMKM Indonesia yang mengembangkan usahanya untuk menembus pasar ekspor. Kondisi ini masih ditambah dengan masih tingginya kekhawatiran di antara pelaku UMKM nasional bahwa proses integrasi ekonomi melalui MEA akan berdampak negatif bagi dunia usaha. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya informasi yang diterima oleh pelaku UMKM. Oleh

karena itu, diperlukan diseminasi yang intensif kepada pelaku usaha mengenai tantangan dan peluang yang hadir bersamaan dengan semakin terintegrasinya negaranegara di ASEAN.

Tantangan inilah yang menjadi pemicu bagi ASEAN untuk bersama-sama menyusun strategi pengembangan UMKM di kawasan sehingga dapat memaksimalkan manfaat dari integrasi ekonomi di ASEAN dan mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.

PENGEMBANGAN UMKM DI ASEAN

Masing-masing negara di ASEAN memiliki program nasional dalam rangka pengembangan UMKM, dan hal ini menjadi salah satu acuan dalam kerja sama ASEAN untuk mendukung program peningkatan daya saing UMKM ASEAN. Kerja sama ASEAN meningkatkan peran UMKM di kawasan dilakukan pada pertemuan ASEAN Working Group on Small and Medium Enterprises Agencies dan pertemuan tingkat pejabat tinggi, yaitu ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprise (ACCMSME).

Sebagaimana termaktub di dalam ASEAN Economic Community Blueprint 2025, ASEAN akan terus fokus pada penguatan dan pengembangan UMKM. Kebijakan dan program UMKM di ASEAN ke depannya difokuskan kepada;

- pengembangan kewirausahaan dan SDM;
- peningkatan kapasitas SDM terkait manajemen, pemasaran,

- jaringan rantai pasok, teknologi dan inovasi;
- 3. advokasi dan dukungan informasi melalui kerja sama dengan berbagai kementerian, badan sektoral dan lembaga, untuk menciptakan pemahaman UMKM terhadap produk keuangan dan membantu UMKM meraih manfaat dari ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement), ACIA (ASEAN Comprehensive Investment Agreement), AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services), ASEAN+1 Free Trade Agreement, dan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)

Berdasarkan kesepakatan para pemimpin ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-27 bulan November 2015 di Kuala Lumpur, ASEAN mempedomani ASEAN
Strategic Action Plan for SME
Development 2016-2025 (SAP SMED
2016-2025) sebagai kerangka acuan
untuk program pengembangan
UMKM di kawasan setelah
terbentuknya ASEAN Economic
Community pada akhir 2015.

Para pemimpin ASEAN sepakat terhadap implementasi lima strategic goals SAP SMED untuk meningkatkan daya saing dan memiliki ketahanan usaha UMKM, yaitu:

Masyarakat ASEAN / Edisi 15 / April 2017 — Masyarakat ASEAN / Edisi 15 / April 2017 9

| No. | Strategic Goals | Negara Pemimpin |
|-----|--|--|
| 1 | Promote Productivity, Technology and Innovation (Meningkatkan produktivitas, teknologi dan inovasi.) | Thailand dan Vietnam |
| 2 | Increase access to finance (Meningkatkan akses pembiayaan) | Malaysia dan Laos |
| 3 | Enhance Market Access and Internalisation (Meningkatkan akses pasar dan internasionalisasi) | Singapura dan Thailand |
| 4 | Enhance Policy and Regulatory Environment (Meningkatkan iklim peraturan dan kebijakan yang kondusif) | Kamboja dan Indonesia |
| 5 | Promote Entrepreneurship & Human Capital Development (Meningkatkan kewirausahaan dan pengembangan sumber daya manusia) | Brunei Darussalam, Filipina dan Myanmar |

Hingga saat ini beberapa program telah dilaksanakan oleh ASEAN dalam kerangka SAP SMED antara lain dimulainya pembahasan antara ACCMSME dan Working Committee on Financial Inclusion untuk upaya mendorong peningkatan akses keuangan bagi UMKM di kawasan.

Hal ini bertujuan agar sektor keuangan di ASEAN dapat memberikan dukungannya kepada UMKM dalam rangka sumber pendanaan yang sering menjadi kendala utama UMKM dalam pengembangan indutsrinya. Pada tahun 2017 ASEAN juga memiliki prioritas untuk menyusun handbook yang menyediakan data bagi UMKM untuk akses sumber keuangan alternatif di ASEAN.

Mengingat masih minimnya informasi yang diterima UMKM mengenai peluang dari Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka saat ini telah diluncurkan website yang memuat informasi kerja sama pengembangan UMKM di kawasan melalui laman www.aseansme.org serta pendirian ASEAN SME Academy pada laman www.asean-sme-academy. org yang berperan sebagai media belajar online secara otodidak bagi UMKM di kawasan. Beberapa materi pembelajaran yang tersedia mencakup keuangan/akuntansi, manajemen, pemasaran, operasi, teknologi, dan perdagangan/logistik.

Guna meningkatkan keterlibatan UMKM di dalam integrasi ekonomi ASEAN dan dalam rangka menghadapi tantangan kompetisi yang semakin besar maka ASEAN juga berupaya menguatkan UMKM di dalam *supply chain* dan *market* access. Dalam kaitan tersebut ASEAN telah melaksanakan beberapa rangkaian workshop yang melibatkan

UMKM dan sejumlah perusahaan multinasional sehingga dapat berkolaborasi untuk memberikan akses pasar bagi UMKM melalui kolaborasi dimaksud.

Salah satu program kunci yang dikoordinir oleh Indonesia adalah proyek ASEAN Business Incubator Network (ABINet) yang diharapkan dapat mendorong kemajuan pengembangan UMKM inovatif pemula di kawasan ASEAN melalui inkubator bisnis dan teknologi yang direncanakan dimulai Juni 2017 - Mei 2019 atas dukungan *Japan-ASEAN* Incubator Fund (JAIF).

Tantangan yang juga dihadapi oleh UMKM adalah prosedur pendirian usaha yang berbeda-beda di negara anggota ASEAN, yang berdampak kepada daya saing UMKM di kawasan. Hasil studi World Bank menunjukkan adanya perbedaan



rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha di ASEAN. Di Indonesia dibutuhkan 13 hari untuk menyelesaikan 47 prosedur. Sedangkan di Laos dibutuhkan 73 hari untuk menyelesaikan 13 prosedur, sementara di Singapura hanya dibutuhkan 3 hari untuk memenuhi 3 prosedur untuk dapat memulai usaha. Perbedaan prosedur dan waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha di masing-masing negara ASEAN menjadi salah satu fokus ASEAN untuk lebih mempermudah UMKM mendirikan usaha.

Guna mendorong pembentukan usaha di ASEAN maka berdasarkan Work Programme on Starting a Business in ASEAN terdapat beberapa program yang akan dilakukan ASEAN pada periode 2016-2017. Untuk menyediakan informasi dalam rangka memulai usaha di kawasan akan dipublikasikan buku panduan memulai/pendaftaran usaha berdasarkan program *Promote* Information Dissemination On Starting A Business.

ASEAN juga membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk memberikan masukan tentang proses dan prosedur dalam memulai/pendaftaran usaha di kawasan melalui *Feedback* Mechanism. Mengingat adanya perbedaan tingkat kemajuan UMKM dan program UMKM di

antara negara ASEAN, maka akan dilakukan Regional Policy Dialogue guna memberikan pemahaman bagi seluruh negara ASEAN mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangan penyederhanaan memulai/ pendaftaran usaha di kawasan.

Banyaknya institusi yang menaungi UMKM menjadi salah satu tantangan dalam pembentukan usaha UMKM di ASEAN. Untuk mengatasinya, ASEAN perlu memiliki program untuk menetapkan mekanisme koordinasi dan model untuk registrasi usaha UMKM di kawasan. Hal-hal tersebut akan menjadi program yang dipimpin oleh Indonesia di bawah pertemuan ASEAN Task Force on Starting a Business yang baru dibentuk pada tahun 2016 guna mempercepat implementasi dari program-program pengembangan UMKM SAP SMED.

Perhatian kepada pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan serta jiwa kewirausahaan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan memberdayakan UMKM di ASEAN. Kemampuan managerial, marketing, market access, dan networking memiliki peranan penting dalam kesuksesan UMKM dalam menjual produknya dan menciptakan usaha berdaya saing tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, ASEAN juga

memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan keterampilam pelaku UMKM. ASEAN telah membuat sebuah kurikulum mengenai kewirausahaan di kawasan yang menjadi kurikulum bersama di perguruan tinggi di ASEAN, guna meningkatkan jiwa kewirausahaan serta keterampilan dari pelaku serta calon pelaku usaha sehingga dapat memanfaatkan peluang dari integrasi ekonomi di kawasan.

Seiring proses integrasi ekonomi kawasan yang semakin sejak terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka upaya-upaya penguatan dan pengembangan UMKM ASEAN melalui implementasi ASEAN Strategic Action Plan for SME Development 2016-2025 diharapkan membuat UMKM ASEAN dapat memaksimalkan potensi ekonomi dari integrasi ASEAN dan menjadikan UMKM sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Bagi para pelaku usaha Indonesia, sudah waktunya setahun pemberlakuan Masyarakat ASEAN menjadi momentum untuk mengubah paradigma. Perusahaan Indonesia seharusnya tidak hanya tumbuh pesat di dalam negeri tetapi juga berekspansi meraih peluang pasar ASEAN.

// Rendy Hadiputra Dit. Kerja Sama Ekonomi ASEAN Direktur International Business and Technology Alfamart, Bambang Setyawan Djojo dan Sesditjen Kerja Sama ASEAN, Ashariyadi // Photo Credit: Sekretariat Ditjen Kerja Sama ASEAN



PT Sumber Alfaria Jaya Tbk merupakan salah satu perusahaan Indonesia yang telah berhasil menembus pasar ASEAN.

Pengelola minimarket Alfamart tersebut menjadikan Filipina sebagai pusat ekspansi bisnisnya di luar negeri. Hingga saat ini telah terdapat sekitar 240 gerai Alfamart yang beroperasi di Filipina dan perusahaan retail ini masih akan terus berekspansi membuka hingga 350 gerai di tahun 2017. Untuk mengetahui kisah di balik kesuksesan Alfamart menembus pasar ASEAN, Tim Redaksi Majalah Masyarakat ASEAN mewawancarai Direktur International Business and Technology, Bambang Setyawan Djojo di Kantor Pusat Alfamart yang berlokasi di Tangerang. Berikut adalah kutipan wawancara dimaksud.

APA VISI ALFAMART?

Core business Alfamart adalah distribusi. Visi Alfamart adalah menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, dalam hal ini berupa franchise. Selain itu kami juga mempunyai visi untuk memberdayakan dan mengangkat kalangan usaha kecil dan menengah (UKM), agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen serta mampu bersaing secara global. Kami menyadari bahwa distribusi ini penting karena kalau kita bisa melakukan secara efektif dan efisien, hal itu bisa membuat konsumen menjadi loyal kepada kami.

BAGAIMANA SEJARAH PERJALANAN USAHA ALFAMART? Alfamart dibuka pada 1999 dan sejak itu mengalami berbagai fase dalam perkembangan usahanya. Periode pertama adalah dari 1999 – 2001 yang kami sebut sebagai fase pembelajaran. Pada periode ini kami membangun fundamental business secara detail, dimana kami membangun business process yang sesuai dengan business minimart.

Periode kedua adalah dari 2002

- 2006, pada periode ini kami
melakukan business and system
development. Pada fase ini kami
juga membangun human capital
atau sumber daya manusia untuk
mengantisipasi perkembangan
bisnis, sekaligus melakukan branding
development untuk memperkenalkan
konsep minimarket yang pada waktu
itu belum dikenal masyarakat secara
luas.

Memasuki periode ketiga yaitu tahun 2007 – 2009, kami melakukan fine-tuning business model untuk semakin menyempurnakan model bisnis minimarket kami. Dimana periode ini kami mulai memasuki pasar di luar Pulau Jawa, khususnya Pulau Sumatera. Saat itu, kami juga mulai membuka franchise kepada masyarakat, kemudian pada tahun 2009, Alfamart juga mulai go-public.

BAGAIMANA DENGAN PERIODE SELANJUTNYA?

Periode keempat adalah tahun 2010-2015, kami melakukan ekspansi tidak hanya di Indonesia bagian barat tetapi juga ke Indonesia bagian timur. Karakteristik pasar Indonesia bagian timur memang memerlukan pendekatan khusus mengingat kerapatan penduduk berkurang dan pulaunya banyak. Kami juga





Salah satu gerai Alfamart di Filipina // Photo Credit: PT Sumber Alfaria Jaya TBK

melihat keberagaman konsumen yang ada di Indonesia sehingga kami meluncurkan konsep "true community store" atau toko milik komunitas. Di beberapa gerai Alfamart kami menyediakan fasilitas yang dapat digunakan warga untuk berkumpul, misalnya untuk arisan, ulang tahun ataupun untuk acara sosial. Kami juga memperkenalkan *value added* services, antara lain untuk membayar tagihan listrik, air dan sebagainya. Di periode ini kami juga meluncurkan konsep Alfamidi untuk memenuhi kevakuman usaha supermarket kecil dengan luas antara 400-1000 m².

Pada periode kelima, 2016 – 2020, kami memasuki fase transformasi antara lain berupa digital initiative melalui pembukaan Alfamind, yaitu toko virtual Alfamart. Selain itu campaign marketing juga kami lakukan secara digital. Kami menyadari bahwa pertumbuhan internet di Indonesia sangat luar biasa mencapai double digit.

Meskipun secara presentase, angka pengguna internet di Indonesia masih rendah dibandingkan Filipina. Pengguna internet Indonesia masih berada di angka 60-70 juta penduduk dari 250 juta penduduk. Sementara Filipina, dengan jumlah penduduk 102 juta jiwa, tingkat penggunaan internet telah mencapai 65 juta penduduk. Namun di masa mendatang kami yakin dengan perbaikan infrastruktur tingkat pertumbuhan pengguna internet di Indonesia akan meningkat lebih cepat lagi.

KAMI MENDAPAT INFORMASI **BAHWA ALFAMART SUDAH** BEROPERASI DI FILIPINA, SEJAK KAPAN ALFAMART **BEREKSPANSI KE FILIPINA?**

Alfamart mulai berekspansi ke Filipina sejak semester kedua tahun 2014. Filipina merupakan negara pertama yang menjadi lokasi ekspansi Alfamart ke luar negeri.

Tahun 2017 ini kami memasuki tahun ketiga hadir di Filipina.

MENGAPA MEMILIH FILIPINA?

Sebelum kami masuk ke Filipina, kami telah mempelajari beberapa negara ASEAN lainnya yang berpotensi untuk kerjasama dengan kami, antara lain Vietnam. Vietnam dan Filipina sama-sama menarik sebagai lokasi investasi Alfamart karena memiliki jumlah penduduk di atas 100 juta jiwa. Hal ini penting untuk mengetahui potensi berapa gerai yang dapat kami buka. Berdasarkan kalkulasi kami, 1 gerai Alfamart akan melayani 10,000 jiwa. Parameter lainnya tentu adalah Gross Domestic Product (GDP) terkait dengan daya beli masyarakat.

ADAKAH FAKTOR LAINNYA?

Faktor penting yang menjadi pertimbangan kami agar mampu berhasil untuk go international

adalah budaya dan perilaku masyarakatnya, apakah ada kemiripannya dengan Indonesia. Berdasarkan apa yang kami pelajari, Vietnam memiliki budaya dan bahasa yang sangat berbeda dengan Indonesia. Selain itu, peraturan untuk bisnis retail nya belum secara *clear* membuka investasi, meskipun mereka selalu menyatakan membuka diri terhadap investasi, tetapi pemerintah Vietnam akan mengevaluasi dampak sosialnya (social impact). Pada saat awal, Alfamart hanya boleh membuka DC (Distribution Centre) dengan 1 gerai dan selanjutnya pemerintah Vietnam akan melakukan evaluasi sebelum memberikan izin untuk membuka gerai berikutnya. Hal ini menjadi hambatan bagi Alfamart, karena sebagai jaringan distribusi kami harus membuka minimum 150 gerai untuk mencapai skala ekonomi untuk 1 DC. Di samping itu, aturan pemerintah Vietnam tidak menyebutkan berapa lama periode evaluasi tersebut. Akhirnya kami

belum bisa membuka gerai Alfamart di sana.

"Faktor penting lainnya yang menjadi

pertimbangan kami agar mampu berhasil untuk

masvarakatnya, apakah ada kemiripannya dengan

go international adalah budaya dan perilaku

BAGAIMANA DENGAN KONDISI DI FILIPINA?

Indonesia."

Di Filipina memiliki peraturan yang lebih jelas, yaitu selama nilai investasinya melebihi Rp2 Miliar maka investor asing dapat memiliki bisnis tersebut. Peraturan lainnya juga mendukung untuk bisnis retail. Kemudian budaya dan perilaku masyarakat Filipina juga memiliki banyak kemiripan dengan Indonesia, misalnya bahasa Tagalog dimana ada kata-kata yang sama dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa.

BAGAIMANA DENGAN PASAR NEGARA ASEAN LAINNYA?

Beberapa Negara ASEAN lainnya, pengusahanya pernah menjajaki untuk kerja sama dengan Alfamart, antara lain Malaysia, Thailand dan Myanmar. Hanya saja kami masih

konsentrasi di Filipina terlebih dahulu, setelah sukses di Filipina maka kami akan penetrasi ke Negara ASEAN lainnya.

APAKAH ALFAMART FILIPINA HANYA MENJUAL PRODUK INDONESIA?

Alfamart merupakan industri retail yang melayani kebutuhan masyarakat di Filipina, oleh karena itu produk yang kami jual di gerai Alfamart Filipina mencakup produk lokal Filipina dan ada juga produk Indonesia. Sejumlah produk Indonesia disukai masyarakat Filipina, seperti halnya Kopiko 78°, Indomie, sabun deterjen, dan sebagainya. Dari sisi industri manufaktur, Indonesia lebih established dibandingkan dengan Filipina sehingga terbuka peluang untuk ekspor produk manufaktur Indonesia ke Filipina. Namun, untuk memasukkan produk Indonesia ke Filipina ada peraturan-peraturan

14 Masyarakat ASEAN / Edisi 15 / April 2017

"Secara natural, sebagai sesama negara ASEAN, Filipina sangat welcome terhadap kehadiran Alfamart."

yang harus dilalui oleh importir. Alfamart tidak memiliki knowledge di bidang import karena fokus kami pada industri retail.

BAGAIMANA FORMAT USAHA ALFAMART DI FILIPINA?

Formatnya merupakan joint venture dan kami bekerjasama dengan SM Group sebagai mitra bisnis kami yang telah menjadi master franchise Alfamart di Filipina. Sebelumnya SM Group telah mempunyai beberapa lini bisnis, untuk lini bisnis retail SM Group telah menjadi franchisee Watson. Ace Hardware dan *Miniso*. Tugas Alfamart Indonesia sebagai franchisor adalah berbagi pengalaman kepada SM untuk mengoperasikan dan mengembangkan bisnis minimarket di Filipina dengan luas toko antara 150-300 m².

APA KENDALA YANG DIHADAPI DALAM **PENGEMBANGAN BISNIS ALFAMART DI FILIPINA?**

Kendala yang kami hadapi terkait dengan ekspansi secara regional adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk sistem bisa saja di copy and paste, tetapi skill manusia tidak bisa

copy and paste karena membutuhkan waktu untuk *trainina* dan diimplementasikan yang akhirnya menjadikan SDM yang terampil. Kita bisa mempercepat beberapa skill dasar, tetapi jika sudah memasuki intermediate dan advanced skill (keahlian tingkat menengah dan ahli, -red), memerlukan waktu untuk melewati periode festive dan pergantian tahun. Skill seseorang bukan hanya dari *training* tetapi juga dari pengalamannya. Dengan demikian setiap orang harus bisa melatih intuisi dan kemampuan untuk mengambil kebijakan strategis. Untuk itu, kami terus menerus melakukan transfer knowledge dan pelatihan.

ADAKAH KENDALA LAINNYA?

Kendala kedua terkait dengan infrastruktur seperti ketersediaan listrik. Di Filipina memerlukan waktu hampir tiga bulan untuk melakukan instalasi listrik hingga dapat berfungsi. Jika Indonesia telah ada pre-paid, di Filipina belum ada.

BAGAIMANA KIAT-KIAT KHUSUS ALFAMART DALAM **MENEMBUS PASAR FILIPINA?** Menurut kami, faktor yang penting untuk diperhatikan adalah budaya dan perilaku konsumen Filipina. Hal ini untuk mengetahui apakah produk maupun layanan yang kami berikan dapat diterima oleh masyarakat setempat. Budaya ini mencakup budaya perusahaan join venture dan budaya masyarakat Filipina. Budaya perusahaan terkait dengan cara kerja *team* antara warga Alfamart Filipina dan warga Alfamart Indonesia. Tentunya ada peraturan dan kebiasaan di Filipina yang berbeda dengan Indonesia. Misalnya kebijakan perusahan untuk pembayaran gaji dilakukan sebulan dua kali. Demikian halnya dengan jam kerja kantor, di Filipina ada *tea* break, yaitu istirahat selama 15 menit sekitar pukul 15.00. Peraturan cuti juga berbeda. Selain itu, Filipina juga memberikan potongan harga khusus bagi lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Hal tersebut hanya secara garis besar, sementara hal-hal lain yang lebih detail masih banyak lagi.

ADAKAH KEMUDAHAN ATAU KEUNTUNGAN YANG **DIMILIKI ALFAMART SEBAGAI** PERUSAHAAN INDONESIA SAAT MEMASUKI PASAR FILIPINA SEBAGAI SESAMA

NEGARA ASEAN?

Secara natural, sebagai sesama negara ASEAN, Filipina sangat welcome terhadap kehadiran Alfamart. Hal ini membuat kami lebih percaya diri dalam berekspansi usaha di sana. Namun demikian secara peraturan, kami harus terus mengikuti peraturan yang berlaku. Kemudian hubungan antara Presiden Jokowi dan Presiden Duterte yang sangat baik juga berpengaruh bagi kami. Dimana baru-baru ini Presiden Duterte mengundang perusahaanperusahaan Indonesia untuk hadir di Istana Malacanang Filipina.

BAGAIMANA DENGAN JUMLAH STAF INDONESIA YANG BEKERJA DI **ALFAMART FILIPINA?**

Tim inti kami di Filipina sebagian besar adalah senior manager yang membantu dalam operation dan pengembangan bisnis Alfamart Filipina. Pada saat awal jumlah team inti 20 orang, dimana mereka akan menjadi *mentor* atau *trainer* bagi *team* Filipina. Kami harus mendaftarkan anggota tim kami dari Indonesia kepada Department of Labour and Employement (DOLE). Pihak DOLE ini akan melakukan visit secara berkala ke kantor kami untuk mengecek siapa saja tim Indonesia dan Filipina yang bekerja di sana.

BAGAIMANA UPAYA ALFAMART UNTUK MENDORONG PRODUK UKM INDONESIA AGAR DAPAT DIPASARKAN DI ALFAMART FILIPINA?

Kami tetap mengikuti jalur formal, jadi seluruh produk yang dijual harus terdaftar di Departemen khusus seperti halnya di Indonesia ada

yang mengatur Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk itu UKM Indonesia perlu terus meningkatkan standarnya agar dapat memenuhi persvaratan sertifikasi menembus pasar internasional. Hal ini khususnya untuk produk makanan yang persyaratannya tentu akan lebih detail dibandingkan misalnya dengan produk kerajinan. Namun demikian, potensi UKM Indonesia masih sangat besar dan dapat terus dikembangkan. Oleh karena itu, apabila persyaratan sertifikasi dan standarisasi telah terpenuhi, maka hal ini akan mempermudah kami untuk memperkenalkan dan memasarkan produk-produk UKM Indonesia di sana.

// Sekretariat Ditjen Kerja Sama **ASEAN**



POJOK PSA

Photo Credit: Setditjen Kerja Sama ASEAN



nak-anak adalah cermin dari kehidupan bangsa. ▲Kehidupan mereka diwarnai keceriaan, bermain dengan teman sepermainan, bercanda ria dengan ayah dan bunda, serta berpikir secara imajinatif. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua anakanak merasakan hal yang sama dalam kehidupannya. Yang disebabkan berbagai macam faktor, seperti child abuse atau kekerasan terhadap anak.

Pada akhir tahun 2016, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis laporan akhir tahun terkait kekerasan anak. Sepanjang tahun 2016, setidaknya terdapat 702 aduan terkait kasus kekerasan anak. Ironisnya, kasus kekerasan terhadap anak, terjadi di lingkungan terdekat, seperti di rumah, sekolah dan lingkungan sosial anak. Berdasarkan lokasi kejadian, kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga sebanyak 40 persen, lingkungan sosial 52 persen, lingkungan sekolah

5 persen, dan tidak disebutkan lokasinya 3 persen. Pola asuh orangtua menjadi faktor penentu perlindungan anak dari kasus kekerasan. Dari hasil penelitian KPAI, 70 persen orang tua belum mampu mengasuh anak menggunakan metode yang cocok dengan perkembangan zaman sekarang. Pola asuh mereka semata-mata hanya meniru apa yang diajarkan orangtua sewaktu kecil.



UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

tentang Perlindungan Anak. Dalam

undang-undang tersebut disebutkan

perlu dilaksanakan sedini mungkin,

kandungan sampai anak berumur 18

tahun. Kemudian, undang-undang

Undang-Undang No. 35 tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak.

bahwa upaya perlindungan anak

yakni sejak dari janin dalam

tersebut disempurnakan oleh

Tahun 2015-2019.

60% orangtua di Indonesia hanya berorientasi pada pendidikan akademik dalam mendidik anak, sedangkan pendidikan mental dan persoalan sosial yang dihadapi anak tidak menjadi prioritas. Hal tersebut juga menjadi penyebab masih banyaknya pelanggaran hak anak di Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan ibu (orang tua) melakukan kekerasan terhadap anak diantaranya karena adanya konflik rumah tangga, perceraian, dan perebutan hak asuh. Faktor-faktor ini kemudian memicu orang tua untuk melanggar hak anak, hingga melakukan kekerasan.

KPAI juga menyatakan bahwa

Salah satu contoh kasus kekerasan terhadap anak terjadi dua tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 Juni 2015. Masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kasus pembunuhan Angeline, anak berusia 8 tahun yang bersekolah di SDN 12 Sanur-Bali. Ia dengan sengaja ditelantarkan oleh orang tua angkatnya, diminta melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuannya serta tidak lagi mendapat perhatian dan kasih sayang.

Tahun 2014, Pasal 14 Ayat (2) yakni terkait hak anak untuk bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua Indonesia telah mengeluarkan orang tuanya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Nasional Perlindungan Anak untuk

Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain dengan menerbitkan Rencana Aksi

> Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain dengan menerbitkan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak untuk Tahun 2015-2019. Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak (RAN-PA) merupakan penjabaran lebih rinci atas pelaksanaan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, di mana arah kebijakan pembangunan dalam bidang perlindungan anak adalah sebagai berikut:

Mengacu pada kasus Angeline, dia adalah anak yang diangkat keluarga Douglash dan Margriet saat masih berusia 3 hari. Orang tua kandung Angeline sendiri, yakni Achmad Rosyidi dan Hamidah, hanya menerima uang sebesar Rp1,8 juta untuk melepas Angeline ke orang tua angkatnya dan proses dilaksanakan hanya dengan kesepakatan akta dari notaris. Setelah proses adopsi dianggap selesai dan disepakati, orang tua kandung dari Angeline tidak diperbolehkan bertemu dengan anaknya hingga dewasa.

Hal ini tentunya telah melanggar hukum karena didalam UUPA No. 35

- Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup;
- Meningkatkan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; dan
- Peningkatan efektifitas kelembagaan perlindungan anak, salah satunya melalui penguatan partisipasi anak muda untuk ikut menentukan arah dan kualitas pembangunan.

18 Masyarakat ASEAN / Edisi 15 / April 2017 Masyarakat ASEAN / Edisi 15 / April 2017 19 Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah, kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa yang diikuti dengan penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dan sudah disahkan oleh DPR untuk menjadi Undang-Undang, Undangundang ini dibuat agar pelaku kasus kekerasan terhadap anak dapat ditindak lanjuti dengan hukum yang berlaku.

UPAYA PERLINDUNGAN HAK ANAK MELALUI MEKANISME DI ASEAN

Di tingkat regional, ASEAN juga telah memiliki mekanisme kerja sama untuk perlindungan anak. Di dalam mekanisme ASEAN terdapat ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), sebuah institusi hak asasi manusia di kawasan ASEAN yang didirikan pada tahun 2010. Komisi ini merupakan komisi antar pemerintah yang diwakili oleh 20 perwakilan, dua dari masingmasing negara anggota ASEAN. Di dalam ACWC, Indonesia memiliki wakil untuk hak anak, yakni Ibu Yuyum Fhahni Paryani. Indonesia sendiri menjadi ketua ACWC untuk tahun 2017.

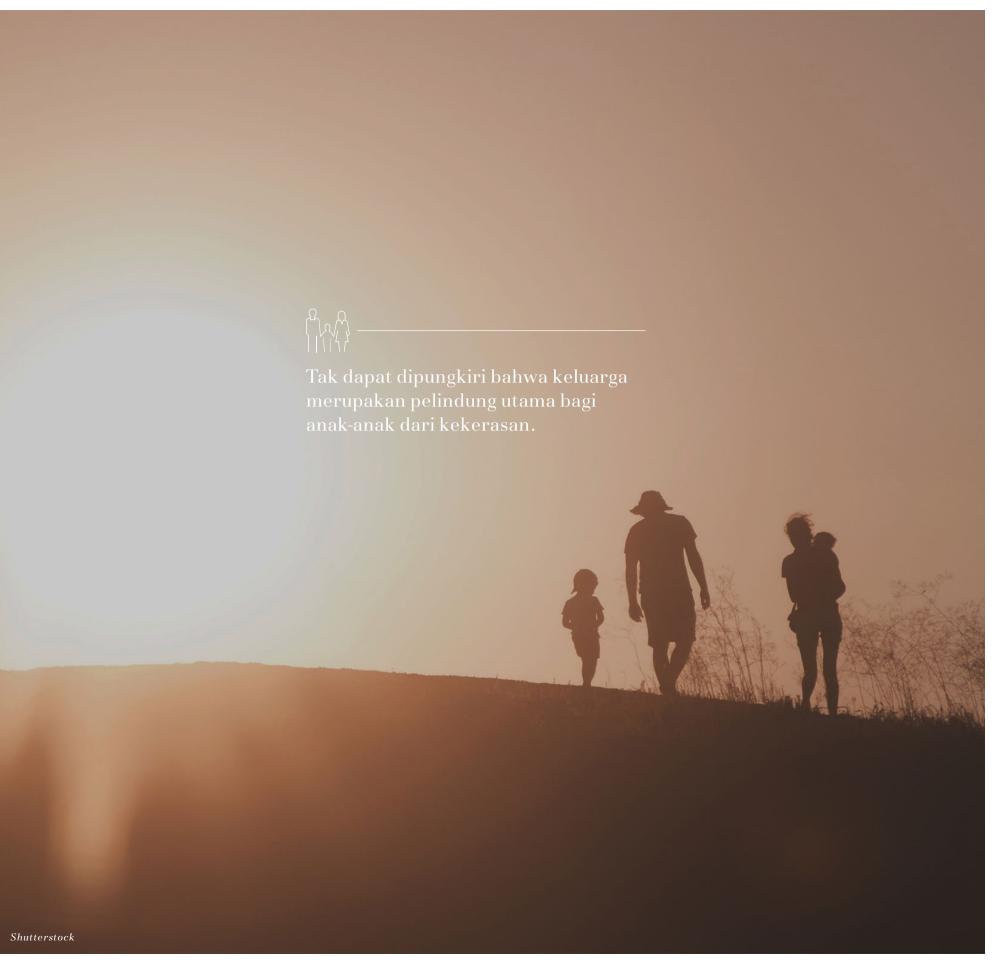
ACWC dalam pertemuannya yang ke-13 di Singapura, pada bulan Oktober 2016, menghasilkan ASEAN Guideline for a Non-Violent Approach to Nature, Care, and Development of

Children, in All Settings. Guidelines atau panduan tersebut memiliki tujuan utama untuk membantu anakanak dan pengasuh mereka dalam tujuh setting yang berbeda, yakni: rumah, sekolah/institusi pendidikan, komunitas, tempat kerja, tempat penampungan alternatif/panti, serta tempat penitipan anak/tempat penampungan untuk peradilan anak.

Guidelines tersebut selaras dengan Regional Plans of Action on Elimination of Violence Against Women and Elimination of Violence Against Children yang juga dihasilkan pada Pertemuan ACWC ke-13 di Singapura. Melalui *guideline* tersebut, terdapat 16 isu tematik yang akan diimplementasikan dalam 5 tahun ke depan.

Tak dapat dipungkiri bahwa keluarga merupakan pelindung utama bagi anak-anak dari kekerasan. Suatu bimbingan dan pendampingan secara baik oleh orang tua merupakan cara yang efektif dalam menciptakan generasi unggulan. Selain itu, peran dari negara sangat diperlukan untuk melindungi anak-anak sebagai masa depan dan penerus bangsa karena anak-anak merupakan cermin dari kepribadian suatu negara.

// Argo Budi Prakoso / Dit. KSBA, Ismaniar Nur Fajriah / UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Edo Saputra / Universitas Bina Nusantara



Yuyum Fhahni Paryani, Perwakilan Indonesia untuk ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) // Photo Credit: Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN



JANGAN ADA KATA BERSAYAP UNTUK PERLINDUNGAN ANAK

"Tabungan masa depan bangsa bukanlah uang melainkan generasi muda yang sehat,' Petikan kata mutiara ini merupakan salah satu inspirasi untuk kita semua. Apa yang disampaikan kiranya menggerakkan animo kesadaran kita untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan anak yang dalam struktur sosial yang sejatinya kerap mengalami ketidakberimbangan, yakni penuh dengan kesenjangan yang berjarak. Berikut kami mencoba untuk menggali lebih lanjut dari Ibu Yuyum Fhahni Paryani, Perwakilan Indonesia untuk the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) mengenai apa dan bagaimana selayang pandang mengenai perlindungan anak di Indonesia dan ASEAN.



BAGAIMANA PANDANGAN UMUM IBU TERKAIT PERKEMBANGAN KERJASAMA ISU PERLINDUNGAN ANAK DI **INDONESIA?**

Perlindungan anak di Indonesia sebenarnya sudah advance karena Pemerintah sudah mau mengambil peran. Hanya saja, implementasinya masih menjadi kelemahan tersendiri. Kebijakan mengenai perlindungan anak juga banyak sekali,seperti salah satunya Kota Layak Anak (KLA). Namun begitu, belum ada kerjasama yang baik antara satu KLA dengan KLA lainnya. KLA juga secara struktural tidak sampai ke tingkat yang lebih rendah, seperti kecamatan, sehingga masyarakat di tingkat bawah tidak mengetahui keberadaan KLA.

Implementasi UU Perlindungan Anak masih belum maksimal. Otonomi daerah masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan UU tersebut. Hal ini karena tidak semua Bupati atau Gubernur memprioritaskan perlindungan anak dan memiliki komitmen dengan KLA (dalam program-program mereka-red), sedangkan mereka memiliki otonomi sendiri.

Selain KLA, ada juga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang di bangun di level Kabupaten, Kota, dan

Provinsi. Sayangnya, masyarakat setempat mengatakan bahwa P2TP2A hanya sebatas papan nama saja, karena pada kenyataannya, kebanyakan P2TP2A tidak menjalankan fungsinya. Khususnya di daerah Nusa Tenggara, tidak ada pekerja sosial apalagi psikolog. Bagaimana kita bicara perlindungan anak jika strukturnya tidak ada?

BAGAIMANA PANDANGAN IBU MENGENAI KINERJA PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT ISU PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA, KHUSUSNYA MENGENAI **RENCANA AKSI NASIONAL** PERLINDUNGAN ANAK UNTUK TAHUN 2015-2019?

Saya sendiri termasuk yang mengkritisi Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak (RAN PA). Setahun lalu atau dua tahun yang lalu, saya diundang untuk membicarakan RAN PA. Saat itu saya kaget karena RAN tidak sesuai dengan ekspetasi saya. Seharusnya RAN lebih berisi implementasiimplementasi, bukan berupa "katakata bersayap". Bukan lagi wacana, tapi sudah kepada aksi. Isinya juga ternyata sangat tidak mencerminkan situasi anak di Indonesia. Informasi situasi analisisnya juga agak tidak jelas. Hanya sedikit isu anak yang ditampilkan. Seharusnya dalam

menganalisa hak anak harus jelas, sebutkan persoalannya dan akar rumputnya apa. Selain itu, diperlukan mapping dan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga terkait isu perlindungan anak dalam membuat kebijakan yang efektif.

BAGAIMANA AGAR PROSES ADOPSI ANAK DAPAT BERJALAN SESUAI DENGAN KORIDOR HUKUM NASIONAL YANG BERLAKU, MENGINGAT PADA TAHUN 2015 TERJADI KASUS PEMBUNUHAN ANGELINE, SEORANG ANAK ANGKAT YANG STATUSNYA **TIDAK SESUAI DENGAN** PROSEDUR ATURAN YANG BERLAKU?

Saya melihat dari sisi lain yang orang lain tidak lihat. Bukan melihat aksi pembunuhannya, tapi mencoba melihat bagaimana itu bisa terjadi (root cause). Hal tersebut sebenarnya bisa terjadi awalnya karena kemiskinan. Orangtua Angeline menikah muda, tidak memiliki pendapatan, dan mengalami kesulitan keuangan. Jika dihitunghitung, usia orangtua Angeline ketika menikah itu sekitar 16-17 tahun. Jadi, dampak pernikahan anak ini bisa jadi berujung menjadi kasus Angeline. Kasus Angeline ini juga bisa dikategorikan sebagai kasus perdagangan anak, karena orangtua



kandungnya menjual anaknya. Orangtuanya tidak merasa itu penjualan anak, karena yang penting ada yang mengurus Angeline. Nah, adopsinya kan tidak berjalan dengan baik. Banyak juga orang yangtidak tahu bahwa untuk masalah adopsi anak seharusnya dibawa ke Kementerian Sosial. Harus ada proses yang benar untuk melakukan adopsi anak.

Nah, untuk sosialisasi mengenai proses adopsi anak, harus melibatkan partisipasi masyarakat. Saya dulu pernah bekerja di NGO dimana programnya membangun perlindungan anak berbasis masyarakat. Jadi bagaimana orangtua, remaja, dan anak-anak berkolaborasi untuk menyediakan layanan yang melindungi anak. Hasilnya semua orang bergerak secara sukarela, tidak dibayar, bergerak ke arisan-arisan, ke pengajian, acara perkawinan. Para relawan inibicara mengenai

perlindungan anak dan hak-hak anak, termasuk mengenai proses adopsi.

BAGAIMANA PANDANGAN UMUM IBU TERKAIT PEKEMBANGAN KERJA SAMA ISU PERLINDUNGAN ANAK DI ASEAN DAN JUGA TERKAIT MEKANISME KERJA SAMA ISU PERLINDUNGAN WANITA DAN ANAK DI PILAR-PILAR MASYARAKAT **ASEAN? BAGAIMANA AGAR MEKANISME INI DAPAT SALING BERSINERGI?**

Jika bicara mengenai ASEAN, masalah perlindungan anak dan perempuan jatuhnya ke ACWC. Tapi jika bicara soal perlindungan perempuan dan anak kan tidak hanya di satu pilar, misalnya pilar sosial budaya. Pilar-pilar lainnya (ketiganya) juga. Semuanya berdampak ke anak. Dampak dari kebijakan dipilar ekonomi, misalnya kesepakatan ekonomi bersama pasti berdampak ke lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan nantinya akan berimbas ke anak.

Dari masing-masing sectoral bodies koordinasinya dan kolaborasinya masih belum kelihatan, meskipun sudah mulai digagas. Hal ini contohnya mengenai isu komunal kita tentang Trafficking in Person, the ASEAN Strategic Framework For Social Welfare And Development (SOMSWD), the ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights (AICHR), dan ACWC membuat kerjasama disana agar terkait satu sama lain. Itu bentuk kolaborasi di ASEAN yang mulai kelihatan, untuk menghindari overlapping satu sama lain. Misalnya, AICHR pasti membicarakan megenai hak asasi manusia, nah di situ ada persoalan anak dan perempuan. Hanya, di bagian apanya yang harus mereka (AICHR) bisa respon.

Di level ASEAN. Indonesia sendiri masih dalam proses untuk membuat panduan *child protection system*. Dalam proses tersebut Indonesia melakukan *mapping child protection* system di ASEAN. Bagaimana kasus kekerasan terhadap anak, kasus child trafficking, child labour bisa dikurangi dengan cara memperkuat sistem. Dengan memperkuat sistem, maka akan mempermudah monitoring kasus-kasus tersebut.

Salah satu hal yang ingin diperkuat dalam penguatan sistem itu adalah adanya upaya pengajuan birth registration (akta kelahiran) bagi anak marjinal, seperti anak-anak jalanan maupun anak-anak yang tinggal di daerah terpencil dan jauh dari jangkauan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas.

BAGAIMANA MENURUT IBU TERKAIT IMPLEMENTASI REGIONAL PLAN OF ACTION ON THE ELIMINATION OF **VIOLENCE AGAINST WOMEN** (RPA-EVAW) DAN REGIONAL PLAN OF ACTION ON THE **ELIMINATION OF VIOLENCE** AGAINST CHILDREN (ASEAN ON EVAC) DI INDONESIA MAUPUN NEGARA ANGGOTA **ASEAN LAINNYA?**

Implemetasi RPA EVAW dam EVAC masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi negara anggota ASEAN, mengenai bagaimana dokumen yang sudah disepakati di tingkat regional diimplementasikan di tingkat nasional. RPA belum menjadi acuan di tingkat nasional negara-negara ASEAN. Contohnya di Indonesia, jarang sekali yang tahu mengenai RPA EVAW dan EVAC. Oleh karena itu, seharusnya dilakukan hal-hal initerkait RPA: Pertama, RPA tersebut diterjemahkan, karena jika tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, maka tidak

akan dibaca oleh orang-orang. Kedua, disosialisasikan agar Kementerian dan Lembaga berbagi peran terhadap RPA. Hal tersebut dilakukan dengan harapan nantinya Indonesia bisa menjadi model dalam penerapan RPA-RPA yang ada di ASEAN. RPA nanti dijadikan acuan untuk membuat kebijakan di Indonesia,sehingga dokumen ini nanti tidak berdiri sendiri tapi menjadi dokumen negara yang dijadikan referensi. Harapan saya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) punya kemauan yang kuat untuk mendukung hal tersebut.

// Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN



KERJA SAMA ASEAN-SELANDIA **BARU UNTUK SEJAHTERAKAN** MASYARAKAT INDONESIA

iapa yang tidak mengenal Selandia Baru? Negara kecil U dengan sejuta pesona di Pasifik Selatan itu menarik jutaan wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Selain menikmati keindahan alam dan keanekaragaman hayatinya, wisatawan juga dapat melakukan berbagai olahraga yang menantang adrenalin. Belum lagi industri kreatif Selandia Baru yang terkenal dengan film-film seperti Lord of the Rings dan the Hobbit.

Tidak hanya indah alamnya, Selandia Baru juga menghasilkan produkproduk bahan makanan berkualitas yang diekspor ke berbagai negara. Meskipun kecil dari segi ukuran negara maupun populasinya, Selandia Baru merupakan negara yang memiliki kontribusi besar di

dunia. Bagaimanakah ASEAN dapat memanfaatkan Selandia Baru sebagai salah satu negara mitra wicara yang terletak cukup dekat di kawasan?

"Saat ini ASEAN memiliki 15 Negara Mitra, baik Mitra Wicara (Penuh), Mitra Sektoral maupun Mitra Pembangunan. Masing-masing negara Anggota ASEAN akan bergantian berperan sebagai Country Coordinator untuk meningkatkan dan mempererat kerja sama dengan negara Mitra Wicara (Penuh). Kesepuluh negara Mitra Wicara (Penuh) dimaksud adalah: Amerika Serikat, Australia, China, India. Jepang, Kanada, Korea Selatan, Rusia, Selandia Baru dan Uni Eropa."

Pada periode 2015-2018, Indonesia merupakan Country Coordinator

Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Selandia Baru. Tentunya hal ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk mengoptimalkan kerja sama kedua pihak, khususnya yang tertuang dalam Rencana Aksi ASEAN-Selandia Baru (2016-2020).

Mungkin tidak banyak orang yang tahu bahwa Selandia Baru telah menjalin hubungan dengan ASEAN sejak dekade 1970-an. Tahun 2015 ASEAN dan Selandia Baru memperingati 40 tahun hubungan kerja sama diantara keduanya. Pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun ASEAN-Selandia Baru pada tahun 2015 kedua pihak menyepakati Rencana Aksi ASEAN-Selandia Baru. Hal yang mengemuka dalam

People Strategy dimaksudkan untuk lebih memperkuat kerja sama people-to-people contact melalui program seperti pemberian beasiswa, pertukaran pelajar dan mahasiswa, pelatihan teknis, serta pelatihan kepemimpinan.

Rencana Aksi tersebut adalah diperkenalkannya dua strategi utama yang berkaitan langsung dengan rakyat dan kesejahteraan, yakni People Strategy dan Prosperity Strategy.

People Strategy dimaksudkan untuk lebih memperkuat kerja sama people-to-people contact melalui program seperti pemberian beasiswa, pertukaran pelajar dan mahasiswa, pelatihan teknis, serta pelatihan kepemimpinan. Sedangkan Prosperity Strategy merupakan penguatan kerja sama yang fokus pada sektor-sektor yang menjadi unggulan Selandia Baru, seperti perdagangan dan investasi, pertanian, serta peternakan.

Komitmen Selandia Baru yang semakin menguat sebagai salah satu Mitra Wicara ASEAN kemudian dikukuhkan dengan peningkatan status kemitraan ASEAN-Selandia Baru menjadi *strategic partnership* sejak tahun 2015. Duta Besar Selandia Baru untuk ASEAN di Jakarta, H.E. Ms. Stephanie Lee menyampaikan adanya kenaikan jumlah dan program kerja sama yang siginifikan antara Selandia Baru dan ASEAN. Tahun 2016, tercatat lebih dari 200 juta dolar Selandia Baru (NZD) disediakan dalam kerangka New Zealand Aid Programme untuk jangka waktu tiga tahun. Negara-negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia, perlu

memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

IMPLEMENTASI KERJA SAMA ASEAN-SELANDIA BARU 2015-2016

Peningkatan komitmen Selandia Baru sebagai *strategic partner* ASEAN salah satunya tercermin pada sektor pendidikan. Tahun 2016, jumlah penerima beasiswa untuk meraih gelar sarjana di universitas di Selandia Baru telah meningkat dari 178 menjadi 225 mahasiswa. Tercatat 4.200 warga ASEAN melamar berbagai skema beasiswa dimaksud. Tak hanya bagi mahasiswa umum, Selandia Baru juga mengundang para diplomat muda ASEAN untuk melakukan kunjungan belajar di Selandia Baru selama 10 hari untuk saling berbagi praktek terbaik dalam hal diplomasi. Selain itu, ASEAN dan Selandia Baru juga telah menyelenggarakan pelatihan keamanan maritim "Exercise Mahi Tangaroa" di Auckland, November 2016 silam.

Di bidang ekonomi, ASEAN-New Zealand Trade and Regulatory Programme mengelola dana 500.000 NZD, khusus untuk pendanaan proyek peningkatan kapasitas ASEAN guna memajukan integrasi perekonomian antara ASEAN dengan Selandia Baru. Negara



26 Masyarakat ASEAN / Edisi 15 / April 2017

kepulauan di Pasifik ini memang aktif menyelenggarakan workshop peningkatan capacity building bagi ASEAN untuk memastikan efektivitas ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) serta mendorong finalisasi arsitektur ekonomi kawasan *Regional* Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Untuk meningkatkan kapasitas para pebisnis muda ASEAN dan Selandia Baru, telah diselenggarakan juga Young Business Leaders Initiative yang telah menerbangkan 16 tokoh bisnis muda ASEAN ke Selandia Baru dan 11 tokoh bisnis muda Selandia Baru ke ASEAN.

Dalam konteks kerja sama ASEAN-Selandia Baru, Indonesia juga patut berbangga saat Walikota Bandung, Mochamad Ridwan Kamil, terpilih bersama Wakil Menteri Luar Negeri

Laos, Saleumxay Kommasith, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Khairy Jamaluddin, menerima Prime Minister Fellow Award dari Pemerintah Selandia Baru. Penghargaan tersebut diberikan oleh Perdana Menteri Selandia Baru pada tahun 2016, H.E John Key, atas inovasi-inovasi kepemimpinan ketiganya.

Beberapa program dan proyek kegiatan tersebut merupakan sebagian contoh dari berbagai kesempatan kerja sama yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dan ASEAN. Merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk mampu mengoptimalkan manfaat prioritas kerja sama *Two Key* Strategies dengan Selandia Baru agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat secara umum

// Fajar Arianto Direktorat Kerja Sama Eksternal **ASEAN**





PEMUDA CEGAH **VIOLENT EXTREMISM** Sebagai ideologi ekstrim kekerasan, Violent Extremism layaknya virus yang menggerogoti masyarakat suatu negara. Fenomena ini tak dapat dikalahkan dengan perang fisik, tetapi dengan memperkuat sistem tata kelola negara dan mempromosikan narasi perdamaian dan toleransi - Jusuf Kalla, 2015

Tolent Extremism atau paham ekstrim kekerasan bukanlah suatu fenomena baru; bahkan telah dikenal sejak beberapa dekade yang lalu. Paham ini pulalah yang memicu berbagai tindakan radikalisme, terorisme dan tindakan kekerasan serupa di Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Seperti kutipan Wakil Presiden diatas, paham ekstrim ini begitu cepat mengibarkan sayapnya dan merekrut masyarakat sipil, terutama pemuda atau "jihadis muda". Melalui penggunaan kekerasan untuk memajukan kepercayaan tertentu, termasuk paham keagamaan, sosial, politik dan ideologi tertentu, Violent Extremism mengancam stabilitas dan keamanan Indonesia dan negara-negara di kawasan.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), terdapat sekitar 500 orang warga Indonesia telah bergabung bersama

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan mayoritas diantaranya adalah kaum muda. Mereka mungkin saja sewaktu-waktu siap kembali ke Indonesia untuk mengembangkan paham radikal yang mereka bawa. Hal menarik dari fenomena ini adalah fakta bahwa rekrutmen warga Indonesia di ISIS sering dilakukan melalui media sosial dan internet. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan penggunaan internet notabene mempercepat penyebaran aliran yang berlandaskan kekerasan ini—terutama diantara kalangan pemuda yang gampang didoktrinasi.

Lebih jauh, data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan lebih dari 27.000 pejuang militan telah bergabung bersama ISIS dari berbagai penjuru dunia. Angka yang menunjukkan urjensi bagi seluruh pihak bertindak cepat menanggulangi perkembangan kelompok ekstrim ini.

PEMUDA BUKAN TARGET **REKRUTMEN TAPI AGEN** PERUBAHAN

Golongan pemuda yang masih mencari jati diri dan mudah terpengaruh dengan paham baru menjadi incaran target rekrutmen kelompok radikal seperti Jemaah Islamiyah (JI) dan ISIS. Hal ini diperburuk jika pemuda yang bersangkutan memiliki masalah dengan keluarga, belum mendapat pekerjaan dan memiliki lingkaran sosial yang dekat dengan kelompok radikal; faktor yang mendukung rekrutmen paham radikal.

Di lain pihak, 60 persen Masyarakat ASEAN adalah kelompok usia dibawah 40 tahun. Jika ASEAN memiliki penduduk sekitar 625 juta, maka terdapat sekitar 350 juta orang yang masih berumur dibawah 40 tahun.

POJOK PSA

Ditengah maraknya penyebaran paham ekstrim kekerasan dan aksi terorisme, ASEAN terus meningkatkan upaya bersama untuk menanggulanginya, termasuk dengan bekerja sama dengan mitra wicara ASEAN.

Dengan kata lain, kelompok pemuda yang melek atau *literate* teknologi dan terkoneksi satu sama lain, memiliki potensi besar untuk dapat menjadi aktor kunci mencegah paham ekstrim kekerasan itu sendiri. Setidaknya terdapat tiga upaya yang dapat dilakukan:

- 1. pemuda sebagai promotor narasi perdamaian dan toleransi di kalangan pemuda dan masyarakat ASEAN
- pemberdayaan komunitas pemuda untuk menghargai keberagaman dan hak berpendapat;
- pelibatan pemuda dalam perumusan kebijakan pembangunan sosial dan penanggulangan paham ekstrim kekerasan.

Dengan usia ASEAN yang telah genap 50 tahun pada 2017 ini, upaya harus terus ditingkatkan untuk mencegah dan membendung violent extremism. Indonesia dan Negara Anggota ASEAN perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi para pemuda untuk mencegah dan menanggulangi Violent Extremism dan terorisme. Hal tersebut sejalan

dengan kenyataan bahwa pemuda adalah pemegang tongkat estafet kepemimpinan dan di tangan pemuda terletak masa depan bangsa dan kawasan.

ASEAN REGIONAL FORUM (ARF) WORKSHOP ON **MAINSTREAMING THE** PREVENTION OF VIOLENT **EXTREMISM IN THE ARF REGION, 15-16 FEBRUARI 2017**

Ditengah maraknya penyebaran paham ekstrim kekerasan dan aksi terorisme, ASEAN terus meningkatkan upaya bersama untuk menanggulanginya, termasuk dengan bekerja sama dengan mitra wicara ASEAN. Dalam membangun kerja sama di tingkat ASEAN, ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) dan ASEAN Political and Security Community Blueprint (APSC) 2027 menjadi landasan penting dalam membangun Masyarakat ASEAN yang lebih aman dan stabil.

Salah satu kegiatan yang baru-baru ini terlaksana adalah ARF workshop on mainstreaming the prevention of violent extremism in the ARF Region

pada tanggal 15-16 Februari 2017 di Brussel, Belgia. Workshop ini menjadi suatu wadah berbagi pengalaman dan praktik-praktik baik dalam pencegahan radikalisme sekaligus mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama penanggulangan violent extremism (VE) ke depan.

Salah satu diskusi hangat yang diangkat selama workshop adalah semakin banyaknya kelompok pemuda dan wanita yang menjadi kaum pejuang militan atau Foreign Terrorist Fighters (FTF). Hal ini disampaikan oleh Mr. Gilles de

Kerchove, European Union (EU) Counter-Terrorism Coordinator pada sesi pidato kunci di awal acara.

Kegiatan ini banyak berdiskusi mengupas akar masalah serta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan paham ekstrim kekerasan. Terdapat beberapa inisiatif berbasis komunitas khususnya pemuda dalam berbagai tingkatan yaitu:

1. primary prevention: memfasilitasi pembelajaran dan pemberdayaan kepada populasi umum, termasuk

- kaum rentan.
- secondary prevention: memberlakukan respon yang tailor-made kepada individual yang berisiko menjadi radikal,
- tertiary prevention: melaksanakan disengagement and reinsertion treatment yang spesifik terhadap individual yang teradikalisasi.

Dalam sesi workshop, negara peserta ARF juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat sipil khususnya perempuan dan pemuda dalam penyusunan strategi

dan program pencegahan paham ekstrim kekerasan. Salah satu kegiatan peningkatan kapasitas yang melibatkan civil society dalam penanggulangan paham ekstrim kekerasan yang telah dilaksanakan di tingkat kawasan yaitu The Fifth ASEAN-UN Workshop: on Conflict Prevention, Preventive Diplomacy and Prevention of Violent Extremism yang diselenggarakan di Jakarta bulan Desember 2016.

Selain itu, ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) yang dimandatkan sebagai institusi



penelitian untuk mempromosikan perdamaian, manajemen dan resolusi konflik di kawasan juga merupakan wadah potensial untuk pembangunan kapasitas dan mempromosikan perdamaian, keamanan dan stabilitas, serta memajukan upaya dialog antarkepercayaan (interfaith dialogue).

PEMUDA SEBAGAI AGEN **PERUBAHAN**

Akhir kata, pemuda merupakan salah satu driving force yang telah berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan masyarakat melawan pengaruh paham ekstrim kekerasan. Beberapa inisiatif telah dihasilkan oleh kalangan muda Indonesia diantaranya yaitu Film dengan judul "Mata Tertutup" (2011) yang disponsori oleh Maarif institute, novel grafis (2010) dengan judul "Ketika Nurani Bicara" yang dipublikasikan oleh Lazuardi Birru.

Ke depan, kiranya para pemuda dapat lebih diberdayakan dan diberikan ruang untuk menjadi promotor narasi perdamaian dan toleransi. Mereka dapat menjadi pembicara dan memaparkan inisiatif mereka sebagai lessons-learned dan best practices dalam berbagai forum baik dalam kerangka regional (ASEAN dan ARF) maupun dalam kerangka global.

Violent Extremism mungkin dapat menyebar dengan begitu cepat, namun kekuatan masyarakat ASEAN yang bersatu, pemuda yang diberdayakan dan masyarakat yang menjunjung toleransi dan perdamaian akan mengalahkan narasi Violent Extremism itu sendiri. Bersama ASEAN, kita berantas violent extremism dan kembangkan narasi perdamaian dan toleransi.

// Niwa Rahmad Dwitama Dit. Kerja Sama Polkam ASEAN





tindakan merespon terorisme yang kawasan, bukan ketergantungan dengan aktor-aktor luar kawasan. Kedua, ia menganjurkan respon terhadap terorisme yang bervisi keawaman warga negara dari serangan aksi terorisme; dalam hal ini negara atau pimpinan eksekutif perlu tampil mengedepankan keselamatan warga negara dari aksi terorisme dan penjaminan pemulihan bagi mereka yang menjadi korban. Ketiga, policy paper ini juga menganjurkan pengarusutamaan counter violent extremism (CVE) -- yang diintegrasikan dengan kontra-terorisme -- untuk merespon ekstremisme berkekerasan. CVE adalah wadah konseptual yang bisa memobilisasi keterlibatan masyarakat dalam upaya kontra-naratif, reintegrasi mantan pelaku ekstremisme dan perlindungan masyarakat rentan dari paparan ekstremisme.

erorisme adalah salah satu masalah transnasional yang mempengaruhi budaya strategis negara-negara Asia Tenggara. Sebelum serangan terorisme pada 11 September 2001 (peristiwa 9/11) di Amerika Serikat pun negara-negara Asia Tenggara telah bergelut dengan masalah terorisme dan radikalisme.

Malaysia, misalnya, pernah menuduh anggota-anggota Parti Islam Se-Malaysia (PAS) memiliki hubungan dengan kelompok teroris transnasional-regional Jemaah Islamiyah (JI). Masa antara peristiwa 9/11 dan Bom Bali I pada Oktober

2002 ditandai dengan menajamnya saling tuding antara Malaysia, Singapura, dan Indonesia dalam hal penanganan terorisme. Malaysia dan Singapura menganggap Indonesia terlalu permisif terhadap terorisme, dan mempermasalahkan sejumlah terduga teroris yang bebas bergerak di Indonesia; sebaliknya, Indonesia juga menuduh Malaysia memberi tempat (harboring) kepada teroris, dan Singapura tidak paham dengan sensitivitas ke-Islaman di Indonesia. Bom Bali I dan legislasi Undang-Undang No. 15/2003 adalah titik awal dari suatu proses yang membentuk institusionalisasi kontra-terorisme di Indonesia dan Asia Tenggara

VISI KONTRA-TERORISME

Respon ASEAN terhadap terorisme masih belum koheren dan kurang memiliki unsur praktis kontraterorisme. Perlu diakui bahwa kerjasama kontra-terorisme masih lebih banyak terjadi antara negaranegara anggota dan negara-negara luar ASEAN, terutama Amerika Serikat. Pada tahun 2002, ASEAN dan Amerika Serikat menandatangani kerjasama kontra-terorisme untuk memperkuat intelligence-sharing, memperbaiki penjagaan perbatasan dan pembekuan aset-aset kelompok teroris. Perjanjian ini merefleksikan suatu dilema bagi negara-negara

ASEAN, antara membangun strategi kontra-terorisme regional yang efektif - tetapi melibatkan negara luar ASEAN - dengan mempertahankan prinsip independensi atau ketahanan regional yang seyogyanya mengarahkan ASEAN menyelesaikan masalah-masalah secara mandiri dari intervensi luar. Karena intervensi luar tetap dibutuhkan, maka ASEAN mengimbangi kehadiran AS dengan juga melakukan kerjsama dengan Tiongkok yang mengusulkan pertemuan tingkat menteri Asia Timur untuk membahas upayaupaya mengendalikan kejahatan internasional dan tindakan kontraterorisme.

Pada 13 Januari 2007, negaranegara ASEAN menandatangani ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) yang hingga saat ini merupakan dokumen formal mutakhir yang merefleksikan konvergensi kebijakan ASEAN di bidang kontra-terorisme. Semangat non-intervensionisme dan menghindari pemaksaan perubahan telah terlihat pada Article III yang tidak memaksakan keberlakuan dari beragam konvensi yang menjadi basis dari definisi "serangan terorisme". Bidang kerja dari ACCT antara lain dalam mencegah pelaksanaan dan pendanaan aksi teroris, mencegah pendana, perencana dan pelaksana aksi teroris menggunakan teritori

negara, mencegah pergerakan pelaku teroris melalui pengendalian perbatasan, capacity building dan kerjasama teknis, public awareness di bidang kontra-terorisme, keriasama lintas batas, pertukaran intelijen, membangun database kawasan di bawah pengawasan ASEAN, capacitybuilding dalam menanggulangi terorisme non-konvensional, terorisme siber dan bentuk-bentuk baru terorisme lainnya.

Melihat bidang-bidang kerja dari

ACCT, negara-negara anggota ASEAN - setidaknya yang secara khusus memiliki masalah terorisme, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand - perlu memiliki keselarasan, meskipun negara-negara ini memiliki konteks politik dan target kontra-terorisme yang berbeda. Thailand dan Filipina menghadapi aksi terorisme yang berbasis teritorial; isu terorisme di kedua negara itu berasosiasi dengan warga minoritas Muslim yang mengalami kesulitan untuk berintegrasi dengan masyarakat mayoritas dengan identitas agama dan etnis yang berbeda. Pemerintah di kedua negara perlu mengintegrasikan kontra-terorisme dengan kebijakan-kebijakan affirmative action dan peace building yang mengameliorasi kondisi-kondisi struktural, seperti pembangunan fisik dan pelayanan sosial yang lebih baik agar sentimen dukungan terhadap terorisme tidak meluas. Langkahlangkah ini juga bisa membantu pemerintah Indonesia untuk menghadapi masalah terorisme, meskipun ini terbatas pada teater kontra-terorisme di daerah yang terisolir seperti Aceh, Papua dan Poso, Sulawesi Tengah.

Tetapi, masalah yang menjadi fundamen bagi terorisme di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh proses national identity-building vang belum selesai direkonsiliasikan karena baru mulai dilakukan pasca berakhirnya otoritarianisme. Meski demikian perlu ada kemiripan atau keselarasan visi kontra-terorisme di antara negara-negara ASEAN. Dalam hal ini, konvergensi visi ini tampaknya terletak pada keinginan untuk melakukan penindakan preventif yang dipadu dengan soft approach untuk menanggulangi konten ekstremis dari pesan-pesan yang dianut dan didiseminasikan kelompok teroris. Referent object utama dari respon negara-negara anggota seyogyanya adalah keselamatan warga negara mereka dari serangan aksi terorisme; retorika keamanan negara (state security/ national security) perlu ditekan untuk tidak menimbulkan dikotomi antara negara dan warga negara.

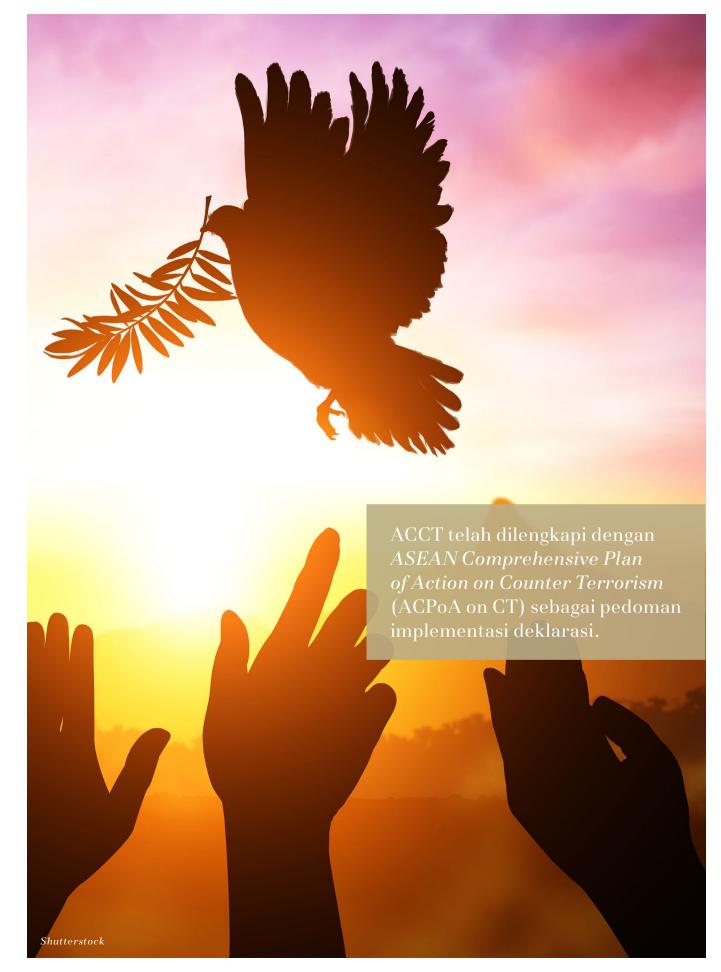
ACCT telah dilengkapi dengan ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism (ACPoA on CT) sebagai pedoman implementasi deklarasi. Hingga saat ini baru tiga negara yang telah meratifikasi konvensi ini, yaitu Singapura, Thailand dan Filipina. Namun konvensi ini tidak memiliki kewenangan yang mengikat negaranegara ASEAN yang terlibat. Konvensi ini hanya berperan sebagai batasan-batasan dan pedoman dalam pelaksanaan kerjasama. Di sisi lain, dalam upaya penekanan kerjasama, ASEAN belum memiliki badan yang memiliki wewenang penuh. ASEAN hanya memiliki suatu forum pertemuan tingkat menteri yang membahas permasalahan kejahatan

transnasional, yaitu ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC).

Sebenarnya AMMTC bukanlah suatu badan yang terbentuk khusus menangani permasalahan terorisme. AMMTC merupakan wadah bagi negara-negara ASEAN dalam membahas permasalahanpermasalahan kejahatan transnasional yang ada di kawasan, dan terorisme termasuk di dalam lingkup pembahasan tersebut berdasarkan ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism dan diperkuat dengan ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime tahun 2002. Dalam ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism dinyatakan bahwa kerjasama counter-terrorism akan berada di bawah naungan AMMTC. Pada perkembangannya, semenjak deklarasi tersebut ditandantangani, AMMTC dijadikan wadah diskusi dan pertukaran informasi dalam permasalahan terorisme. AMMTC memang memiliki mekanisme Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC) sebagai subordinasinya. Dalam SOMTC tersebut Indonesia menjadi lead shepherd dalam bidang counter-terrorism.

DESIGNATION LIST

Mengingat pentingnya melakukan evaluasi dalam aksi-aksi koordinatif dalam penindakan terduga teroris dan juga semakin besarnya komitmen untuk menguatkan peran kontraterorisme dalam dokumen APSC 2025, maka ada baiknya pertemuan tingkat menteri dan pejabat senior bisa mengagendakan secara khusus





pertemuan evaluatif maupun proyeksi ke depan untuk langkah-langkah di bidang kontra-terorisme. ACCT sendiri merupakan dokumen yang meyiratkan perlu melakukan capacity building dalam bidang penindakan di bidang kontra-terorisme untuk memastikan terduga teroris yang melintas batas tidak hilang di salah satu negara anggota seperti yang telah digariskan oleh Article VIII. Berkenaan dengan Article VIII pula, negara-negara anggota ASEAN perlu memiliki designation list yang secara publik dikeluarkan untuk memastikan negara-negara anggota, baik pemerintah maupun warqanya dapat berpartisipasi dalam mencegah aksi teror. Selain itu, designation list ini dapat berperan sebagai penggentaran bagi warga negara anggota yang berpikir untuk bergabung.

COUNTER-VIOLENT EXTREMISM

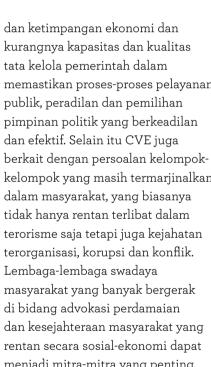
Negara-negara Asia Tenggara umumnya mendikotomikan antara soft approaches yang berfokus pada upaya deradikalisasi dan hard approaches yang berfokus

pada penindakan -- baik berupa penangkapan maupun eliminasi -- terhadap tersangka-tersangka tindak pidana terorisme. Meskipun soft approaches perlu dilakukan, selama ini target penerimanya sangat terbatas pada lingkungan residivis dan kelompok-kelompok yang rentan (vulnerable groups) sehingga justru memperkuat wacana 'peran ajaran agama sebagai akar masalah' dari ekstremisme berkekerasan (violent extremism). Soft-approaches terdiri dari kebijakan-kebijakan yang saat ini terhimpun dalam kategori counter violent-extremism (CVE), dan konsep ini dapat diarusutamakan dalam wacana kebijakan di ASEAN dalam merespon terorisme.

Keterlibatan masyarakat sipil dalam penanggulangan terorisme akan lebih produktif diarahkan pada level lokal, dan dalam hal ini ASEAN dapat melakukan fungsi pemberdayaan. Pemerintah dan aktor-aktor lokal dapat berkontribusi pada upaya CVE. CVE berkonsentrasi pada faktorfaktor struktural dapat memfasilitasi bergabungnya individu ke dalam kelompok teroris pada keanggotaan level rendah, seperti kemiskinan

kurangnya kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintah dalam memastikan proses-proses pelayanan publik, peradilan dan pemilihan pimpinan politik yang berkeadilan dan efektif. Selain itu CVE juga berkait dengan persoalan kelompokkelompok yang masih termarjinalkan dalam masyarakat, yang biasanya tidak hanva rentan terlibat dalam terorisme saja tetapi juga kejahatan terorganisasi, korupsi dan konflik. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang banyak bergerak di bidang advokasi perdamaian dan kesejahteraan masyarakat yang rentan secara sosial-ekonomi dapat menjadi mitra-mitra yang penting.

Strategi CVE seperti yang terlihat pada piramida di atas, ditujukan untuk tiga target yang berbeda sesuai dengan tingkat paparan mereka terhadap ekstremisme. Mereka yang sudah pada tahap operasional tentu perlu dikenai tindakantindakan punitif, diinterogasi keluasan dan kedalaman jaringan nya. Pada tindakan-tindakan punitif ini pemerintah perlu merancang



narasi kontra-terorisme atau strategi kontra-terorisme yang gamblang kepada publik tentang apa yang akan mereka lakukan untuk merespon ekstremisme berkekerasan. Mereka yang belum operasional atau mantan pelaku perlu diberi pilihan-pilihan -- termasuk *career support* -- untuk keluar dari ekstremisme. Keterlibatan akademisi ahli, organisasi-organisasi pelaku *community engagement* perlu dilibatkan sebagai inisiator dari aktivitas-aktivitas intervensi untuk memfasilitasi disengagement dari ekstremisme ini. Tindakantindakan preventif diterapkan untuk mencegah perluasan ekstremisme. Lagi-lagi dibutuhkan kelompok civil society dan swasta untuk secara berkelanjutan memformulasikan dan mendiseminasikan pesan-pesan "antiintoleransi". Dalam hal ini intoleransi terhadap mereka yang berbeda -baik dalam hal ras, suku, golongan -- perlu diproyeksikan sebagai sumber kebahayaan bagi individu warga negara.

Shutterstock

Dalam rangka merespon kembalinya warga Asia Tenggara dari Suriah, pemerintah negara-negara anggota ASEAN perlu melakukan intelligence sharing dalam membentuk database warga mereka yang bepergian dan pulang dari Suriah untuk kepentingan bergabung dengan Islamic State. Selain itu, strategi CVE juga bisa diterapkan dalam merespon para returnees. Ketimbang mengancam mereka dengan pidana atau pencabutan kewarganegaraan, para returnees dapat terlebih dahulu melewati suatu screening yang dilakukan oleh aparat keamanan untuk menentukan apakah mereka melakukan tindak pidana selama bepergian ke Suriah. Mereka yang tidak menimbulkan potensi bahaya perlu difasilitasi untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat, ini termasuk konseling psikologis dan dukungan karir. Langkah-langkah ini perlu dilakukan dalam perspektif jangka panjang, terutama karena pada awalnya akan mendapat penolakan

dari para returnees sendiri. Tetapi perspektif jangka panjang ini penting untuk menjaga ketersediaan anggaran pemerintah. ASEAN dapat mengarusutamakan langkah-langkah ini dan bila perlu melakukannya secara simultan antar negara-negara anggota dengan masalah returnees dari Suriah.

// Ali Wibisono, Ph. D Pusat Studi ASEAN Universitas Indonesia

*Tulisan ini merupakan salah satu Policy Paper yang disampaikan dalam rangka Rapat Konsolidasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dengan Pusat Studi ASEAN (PSA), Jakarta, 1-2 Desember 2016

40 Masyarakat ASEAN / Edisi 15 / April 2017

MAHASISWA PAHAMI HUKUM **ASEAN**

Suasana Diskusi Pemuatan Elemen/Topik Khusus tentang Sistem Hukum di Negara-negara Anggota ASEAN dalam Kurikulum Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia", Yogyakarta, 31 Januari 2017



erlukah mahasiswa fakultas hukum di Indonesia mempelajari hukum negaranegara ASEAN? Hal ini adalah salah satu pertanyaan yang muncul dalam diskusi bertema "Pemuatan Elemen/ Topik Khusus tentang Sistem Hukum di Negara-negara Anggota ASEAN dalam Kurikulum Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI di Yoqyakarta, 31 Januari 2017 lalu.

Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan mengundang para akademisi fakultas hukum dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Pulau Jawa, yaitu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Sebelas Maret

Surakarta, Universitas Indonesia Jakarta, Universitas Trisakti Jakarta, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Surabaya, Universitas Pelita Harapan Surabaya, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dan Universitas Brawijaya Malang, serta pejabat Kemristek Dikti.

Kegiatan ini diselenggarakan agar para dosen dari berbagai fakultas hukum yang hadir bisa berbagi pendapat, pengalaman dan diskusi menjajaki rencana pemuatan elemenelemen pengajaran mengenai sistem hukum ASEAN di kurikulum fakultas hukum di Indonesia.

"Kompetensi dan pemahaman akan sistem hukum dan perkembangan kerja sama hukum di ASEAN adalah suatu keharusan bagi sarjana hukum Indonesia untuk bisa berkiprah di era Masyarakat ASEAN," kata Prof. Johannes Gunawan S.H LL.M dari Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi.

Sebagai suatu organisasi yang tahun ini akan berumur 50 tahun, ASEAN telah mengalami perkembangan pesat yang dipengaruhi oleh berbagai dinamika politik dan sejarah dunia dan khususnya peristiwa politik yang dialami oleh negara-negara anggotanya seperti perubahan sistem pemerintahan yang semakin demokratis, krisis ekonomi dan globalisasi maupun regionalisme. Seluruh dinamika tersebut turut mempengaruhi ASEAN dalam bentuk pembentukan berbagai instrumen hukum yang mengikat kesepuluh Negata Anggota ASEAN.

Maka diskusi dimulai dengan paparan mengenai perkembangan kerja sama ASEAN di bidang politik dan keamanan oleh Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN. Kementerian Luar Negeri, Bpk. Chandra W. Yudha.

Para Narasumber (Dari Kanan ke Kiri): Dir. Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN (Chandra W. Yudha), Dir. Hukum dan Perjanjian Kewilayahan (Bebep A.K.N.

Djundjunan) dan Perwakilan Sekretariat ASEAN (Sendy Hermawati)

Banyak pihak yang masih belum memahami *milestone* dari perjalanan ASEAN sebagai salah satu organisasi regional yang paling stabil di dunia, seperti Bali Concord I dan II, penandatanganan Piagam ASEAN dan pembentukan Masyarakat ASEAN di tahun 2015.

Dari segi hukum, berlakunya Piagam ASEAN pada bulan Desember 2008 telah membawa kerja sama diantara negara-negara ASEAN ke arah yang lebih solid. Sebagai suatu statuta dasar berbagai pasal yang dimuat dalam Piagam kemudian diterjemahkan ke dalam perjanjianperjanjian yang lebih teknis, maupun pedoman-pedoman yang berlaku di kawasan, termasuk penyusunan hukum nasional baru di seluruh negara anggota, untuk memastikan Piagam terlaksana dan Masyarakat ASEAN terwujudnya.

Setelahnya, Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Kementerian Luar Negeri, Bebeb A.K.N. Djundjunan dan Sendy Hermawati dari Sekretariat ASEAN, menyampaikan paparannya masing masing. Isu kerja sama ASEAN untuk menangani terorisme, mamajemen kawasan serta kerja sama regional pada Illegal, Unreported and Unregulated Finishing (IUUF) menjadi topik yang mengemuka dalam diskusi tersebut. Disampaikan juga kerangka kerja sama hukum di ketiga pilar ASEAN serta mekanisme ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLOM).

Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kemlu dalam rangka implementasi Visi ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama khususnya pilar kerja sama Politik Keamanan yang mencantumkan pengembangan kurikulum perguruan tinggi mengenai sistem hukum masingmasing negara anggota ASEAN dan instrumen hukum dari Masyarakat ASEAN.

Pemuatan hal ini dalam Visi ASEAN 2025 menjadikan hal ini sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh negara anggota ASEAN. Hal ini menjadi dasar bagi Direktorat Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI untuk menyelenggarakan kegiatan diskusi tersebut.

// Mia Padmasari Dit. Kerja Sama Polkam ASEAN

42 Masyarakat ASEAN / Edisi 15 / April 2017 —



Sesditjen Kerja Sama ASEAN, Ashariyadi beserta Mahasiswa FISIP Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu, peserta Kuliah Umum "Membangun Daya Saing Desa: Antara Peluang dan Tantangan di Era Pasar Bebas ASEAN" di Pusdiklat Kemlu, Jakarta, 21 Maret 2017



Dr. Hazairin, S.H. (UNIHAZ) Bengkulu dengan Kementerian Luar Negeri memungkinkan mahasiswa UNIHAZ mendapatkan informasi langsung dari Kemlu mengenai ASEAN dan peluang bagi Bengkulu untuk menggali potensinya dalam era Masyarakat ASEAN," demikian disampaikan Dra. Harmiati, M.Si., Dekan FISIP UNIHAZ pada kesempatan Kuliah Umum bagi FISIP UNIHAZ, yang diselenggarakan oleh Setditjen Kerja Sama ASEAN di Jakarta, 21 Maret 2017. Kegiatan ini adalah salah satu dari rangkaian Kuliah Kerja Lapangan yang diikuti 70 mahasiswa serta sepuluh dosen pendamping.

Kerja sama yang dimaksudkan Harmiati adalah Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Bidang

Pendidikan, Penelitian/Pengkajian Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat antara Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dan UNIHAZ, yang ditandatangani 27 Agustus 2015. Salah satu implementasi kerjasama tersebut adalah pembentukan Pusat Studi ASEAN (PSA) di UNIHAZ. Dalam kaitan ini, Ditjen Kerja Sama ASEAN dan PSA UNIHAZ telah beberapa kali melaksanakan kegiatan bersama untuk mendorong penguatan pemahaman publik di Bengkulu mengenai kerja sama ASEAN, berupa kuliah umum, pameran foto ASEAN dan kegiatan lomba debat dan *public* speaking dalam Bahasa Inggris.

Ashariyadi, Sekretaris Ditjen Kerja Sama ASEAN, menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa UNIHAZ yang menunjukkan semangat tinggi

untuk mengenal ASEAN lebih dalam. Dalam presentasinya, Sesditjen Kerja Sama ASEAN menjelaskan perkembangan ASEAN yang kini telah memasuki masa Masyarakat ASEAN. Dalam konteks ini, ia menjelaskan dibalik tantangan menghdapi integrasi kawasan, juga terbentang banyak peluang ekonomi bagi dunia usaha Indonesia. Peluangpeluang ini telah dimanfaatkan oleh sejumlah perusahaan nasional dan karenanya Sesditjen Kerja Sama ASEAN mendorong kalangan bisnis di Provinsi Bengkulu untuk juga menjajaki pasar ASEAN.

Agar semakin tepat sasaran, kali ini Setditjen Kerja Sama ASEAN menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) untuk mendiseminasikan informasi tentang "Membangun Dava Saing Desa: Antara Peluang dan Tantangan di Era Pasar Bebas ASEAN". Mulyadin Malik, Kasubdit Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa menekankan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi salah satu jawaban atas pentingnya peningkatan daya saing ekonomi desa di Indonesia menghadapi era pasar bebas.

Mulyadin Malik mengatakan, "Terdapat 74.000 desa di Indonesia sehingga idealnya desa menjadi penggerak perekonomian Indonesia. Untuk merealisasikan hal itu. 14.777 desa telah memiliki BUMDes. BUMDes dimulai sejak 2014, sebagian masih berskala keci/baru, tetapi ada pula yang sudah bersakala menengah dan mandiri." Berbeda dengan koperasi, BUMDes bukan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan

anggotanya, melainkan masyarakat desa secara keseluruhan. Masingmasing BUMDes per tahunnya menerima anggaran sebesar 800 juta hingga 1,2 milyar dari pemerintah dan mendapatkan pendampingan dari KDPDTT. Tujuan akhir dari BUMDes adalah melahirkan produk yang berdaya saing secara nasional untuk kemudian meluas secara regional dan internasional. BUMDes di Klaten dan BUMDes di Blitar diakui sebagai contoh yang telah menggeliat secara nasional.

"Pemanfaatan teknologi informasi pun menjadi salah satu sasaran utama sehingga sebagian BUMDes telah memasarkan produk mereka melalui aplikasi jual beli online," Mulyadin menambahkan.

// Sylvia Masri Setditjen Kerja Sama ASEAN



Masih terdapat banyak pertanyaan di benak masyarakat di Indonesia mengenai terbentuknya Masyarakat ASEAN dan juga Masyarakat Ekonomi ASEAN. Untuk memberikan pemahaman vang lebih jelas kepada masyarakat khususnya kalangan mahasiswa maka Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN menyelenggarakan kegiatan diseminasi informasi di berbagai Universitas di Indonesia. Diharapkan para mahasiswa ini dapat menjadi penyambung lidah untuk menjelaskan mengenai ASEAN kepada masyarakat disekitarnya.

"Pusat Studi ASEAN memiliki posisi strategis dalam menepis kekhawatiran masyarakat mengenai Masyarakat ASEAN melalui kajian-kajian yang dibuat."

Sekretaris Direktorat Jenderal Keria Sama ASEAN, Ashariyadi, bersama tim Majalah Masyarakat ASEAN (MMA) mengunjungi Universitas Syiah Kuala Aceh tanggal 17 Februari 2017 dalam rangka memberikan Kuliah Umum mengenai "Satu Tahun Masyarakat ASEAN dan Capaian Masyarakat Ekonomi ASEAN".

Para mahasiswa nampak antusias mengikuti kuliah umum terlihat dari berbagai pertanyaan yang diajukan sebagai bentuk keingintahuan mereka mengenai Masyarakat ASEAN. Kegiatan diseminasi informasi ini terselenggara atas kerja sama dengan Pusat Studi ASEAN Universitas Syiah Kuala.

Pusat Studi ASEAN (PSA) di sana dibentuk tanggal 2 Desember 2016 oleh Kementerian Luar Negeri untuk ikut membantu melakukan diseminasi informasi ASEAN kepada masyarakat Aceh khususnya, dan sekaligus rekan strategis dalam memberikan masukan, melalui dukungan studi serta penelitian, bagi penyusunan prakarsa dan rekomendasi Pemerintah RI yang akan disampaikan dalam berbagai pertemuan-pertemuan ASEAN. Rektor Syiah Kuala, Bapak Prof. Dr. Ir. Syamsul Rijal, M.Eng. dalam pembukaan menyampaikan,

"Pusat Studi ASEAN memiliki posisi strategis dalam menepis kekhawatiran masyarakat mengenai Masyarakat ASEAN melalui kajiankajian yang dibuat."

Saat ini. 34 PSA sudah terbentuk di seluruh Indonesia, PSA juga memiliki manfaat untuk meningkatkan ketahanan serta memberdayakan masyarakat di sekitarnya. PSA diharapkan juga untuk dapat membuat penelitian mengenai kekuatan keberagaman daerahnya untuk memacu persaingan masyarakat lokal di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia bukanlah satu-satunnya negara yang memiliki PSA. Jepang, Thailand, Cambodia, Tiongkok, juga berlombalomba membentuk PSA.

"Mahasiswa tidak perlu takut menghadapi Masyarakat ASEAN, dapat dilihat bahwa jumlah pekerja asing tiap tahunnya semakin menurun, "tegas Ashariyadi.

Sesditjen menjelaskan, bahwa sesungguhnya Indonesia cukup bersaing di Masyarakat ASEAN. Angka menunjukkan bahwa jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di ASEAN lebih banyak dari pada warga negara ASEAN lain yang bekerja di Indonesia.

Sebanyak seratus lima puluh anak muda Aceh hadir dan berpartisipasi aktif khususnya dalam menggali informasi lebih dalam mengenai Mutual Recognition Arrangement (MRA), Kerja Sama Ekonomi, serta bagaimana meningkatkan kompetensi mereka dalam menghadapi persaingan di Masvarakat ASEAN.

Pada kesempatan itu juga, untuk menonjolkan kreativitas mahasiswa Aceh, dipamerkan produk "Minyeuk Prett", produk asli buatan pemuda Aceh yang telah menembus pasar Arab Saudi. "Minyeuk" berarti minyak, "prett" adalah suara botol parfum yang ditekan. Minyeuk prett adalah minyak wangi dengan aroma mirip minyak kasturi yang banyak dijual di jasirah Arab. Ini menunjukkan bahwa para pemuda Aceh tidak takut bersaing dan mempunyai produk yang berdaya saing.

// Thalita Hindarto Setditjen KSA





Seru ngobrol tentang Masyarakat ASEAN di ASEAN Corner yang diselenggarakan Ditjen Kerja Sama ASEAN Kemlu pada Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta, 7-8

SEMANGAT PELAJAR JAKARTA DUKUNG ASEAN

🗝 emlu terus mengupayakan penguatan pemahaman publik domestik tentang Masyarakat ASEAN. Dalam Pekan Pendidikan Tinggi Jakarta (PPTJ) ke-10 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 7-8 Februari 2017, Ditjen Kerja Sama ASEAN membuka ASEAN Corner untuk ngobrol dengan pengunjung PPTJ. Kegiatan tersebut diutamakan untuk meningkatkan pemahaman kalangan pelajar dan mahasiswa tentang Masyarakat ASEAN sehingga mereka terdorong untuk semaking mendukung kerja sama ASEAN dan meningkatkan daya saing di ASEAN. Kegiatan ASEAN Corner sejalan dengan tujuan PPTJ tahun ini, yaitu untuk mendukung daya saing pembangunan manusia Indonesia, termasuk di ASEAN.

Pengunjung ASEAN Corner mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan seperti apakah mereka merasakan manfaat ASEAN serta terdorong untuk turut menyebarkan informasi kepada keluarga dan rekan mengenai Masyarakat ASEAN. Dalam hal ini, terdapat dua jawaban yang dapat dipilih yakni setuju atau tidak setuju.

Dari 200 peserta, 148 orang menjawab 100% setuju, 47 orang memberikan jawaban 90% setuju, dan 5 orang setuju 80%. Dengan kata lain, sebagian besar pengunjung ASEAN Corner setuju bahwa ASEAN Corner tersebut membantu meningkatkan pemahaman mereka mengenai Masyarakat ASEAN, serta merasa terdorong untuk mendukung dan meraih manfaat kerja sama ASEAN.

Peserta antara lain berasal dari SMA 110 Jakarta, SMA 6 Jakarta, MAN 3 Jakarta, dan SMA 7 Tangerang Selatan.

PPTJ tahun 2017 mengambil tema 'Daya Saing ASEAN Incorporated Dalam Pembangunan Manusia', diikuti oleh puluhan perguruan tinggi di Indonesia Selain ASEAN Corner, Ditjen Kerja Sama ASEAN turut mengisi acara dalam *Rector* Forum Room dengan tema "Peluang Kerja Sama Pengembangan Pendidikan Negara-Negara ASEAN" dan "ASEAN University Network: Education Beyond Borders".

// Sylvia Masri Setditjen Kerja Sama ASEAN

FOTO-FOTO











MAHASISWA DUKUNG "ASEAN UNTUK RAKYAT"



ASEAN itu bukan milik elit politik saja namun masyarakat ASEAN. ASEAN adalah kita #ASEANuntukRakyat #UPNVY", begitu kesan yang ditulis oleh Danty dalam akun Twitter-nya @yudantirs, usai mengikuti Kunjungan Studi di Kementerian Luar Negeri pada tanggal 17 Januari 2017.

Danty merupakan salah satu dari 79 (tujuh puluh sembilan) mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta yang melakukan kunjungan studi di Kemlu untuk menggali lebih dalam mengenai isu-isu politik keamanan ASEAN yang sedang hangat diperbincangkan di dalam negeri, antara lain Laut China Selatan, terorisme, IUU Fishing, dan keamanan maritim di sekitar Laut Sulu.

Keingintahuan para peserta tersebut terbayar dalam sesi diskusi yang dibawakan oleh Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN dan Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Kementerian Luar Negeri.

Dijelaskan bahwa dalam upaya pemeliharaan perdamaian di LCS misalnya, Indonesia, melalui ASEAN, terus berperan aktif sebagai *honest* broker mengajak negara-negara yang bersengketa untuk dapat menahan diri, tidak melakukan kegiatan yang dapat menciptakan ketegangan, serta menciptakan kondisi yang kondusif di kawasan. Indonesia juga menekankan bahwa negaranegara harus berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai, termasuk menghormati secara penuh proses diplomatik dan mematuhi hukum internasional yang berlaku.

Tidak hanya itu, peran penting Indonesia juga terlihat dari upaya nya dalam memajukan kerja sama pemberantasan IUU Fishing di ASEAN. Misalnya melalui ASEAN Regional Forum (ARF), Indonesia memprakarsai penyusunan ARF Statement on Cooperation to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing yang memuat tanggung jawab negara dan para penegak hukum dalam mencegah dan menindak para pelaku IUU Fishing. Meskipun belum berhasil, upaya ini telah menjadikan isu ini penting di ASEAN.

Disampaikan pula kepada peserta bahwa Indonesia terus memimpin dan mendorong perkembangan kerja sama pemberantasan terorisme di kawasan, hingga akhirnya menghasilkan ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT). Indonesia terus mendorong upaya negara anggota ASEAN untuk mengimplementasikan ACCT ini.

Mengenai isu keamanan maritim di Laut Sulu, ditegaskan kepada para peserta bahwa Laut Sulu berada di wilayah yurisdiksi Filipina. Namun demikian, Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah menyepakati kerja sama patroli terkoordinasi di sekitar wilayah tersebut untuk lebih meningkatkan keamanan di kawasan.

Dari hasil diskusi tersebut, para peserta mendapatkakan pemahaman mendalam mengenai bagaimana Indonesia, melalui berbagai inisiatifnya, berkontribusi terhadap pembangunan Pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, serta bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan manfaat dari kemajuan pembangunan dimaksud. Hal ini sejalan dengan upaya Kemlu untuk membumikan diplomasi sekaligus mewujudkan visi ASEAN people centered and people oriented.

// Niken Budi Astuti Dit. Kerja Sama Polkam ASEAN

SURVEI PEMBACA MAJALAH MASYARAKAT ASEAN (MMA)



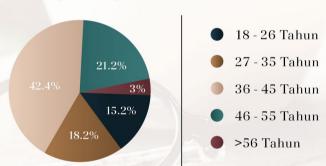


39.4% Perempuan

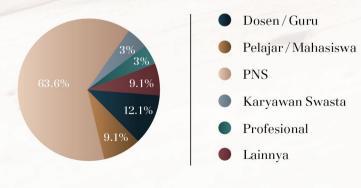


60.6%Laki-laki

Usia (Tahun)



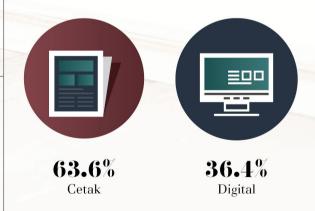
Pekerjaan



Pendidikan Terakhir



Preferensi majalah yang diinginkan?



Pernahkah anda membaca MMA?





Apakah **MMA** dirasakan bermanfaat?



Berminatkah anda untuk menerima **MMA** secara rutin?





Jenis rubik yang disukai? (Berdasarkan urutan)

1 Laporan Utama

4 Laporan Khusus

5 Wisata

9 Pojok PSA

2 Perspektif

6 Wawancara

10 Serba-serbi

3 Infografis

7 Galeri

8 Reportase

12 Apa Kata Mereka

11 Pojok Sosialisasi

• MAJALAH MASYARAKAT ASEAN (MMA) GOES •



Untuk masuk ke dalam daftar *mailing list* penerima MMA secara reguler, mohon infokan alamat surel anda kepada Tim Redaksi melalui alamat: mma@kemlu.go.id



- Masuklah ke situs www.kemlu.go.id
- Anda dapat membuka dan mengunduh Majalah ASEAN pada kolom "Cari" atau "Search"
- Klik edisi Majalah Masyarakat ASEAN yang ingin anda baca



- Klik Playstore > pada pilihan menu yang ada dalam telepon pintar anda atau akses https://play.google.com/
- Ketik "Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN" pada kolom pencarian

Pilih Edisi Majalah Masyarakat

• ASEAN yang ingin anda baca

Klik "Free" atau "Bebas"

Klik "Read" atau "baca".

